

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GENDER DALAM  
PEMBAHASAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PADA  
KOMPAS.COM DAN TEMPO.CO**

**(Rentang Waktu 8 Januari - 24 April 2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh :

**DEVI JIHADILLAH WIBISONO**

**( I71217051 )**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Jihadillah Wibisono

NIM : 171217051

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : Analisis Framing Pemberitaan Gender Dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Pada Kompas.com dan Tempo.co (Rentang Waktu dari 8 Januari – 24 April 2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila Skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 03 Agustus 2022

Yang Menyatakan



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAK  
TEMPEL  
651B7AK071485338

Devi Jihadillah Wibisono

NIM : 171217051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Devi Jihadillah Wibisono

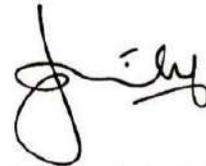
NIM : 171217051

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **Analisis Framing Pemberitaan Gender Dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Pada Kompas.com dan Tempo.co**, Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 03 Agustus 2022

Pembimbing



Laili Bariroh, M.Si

---

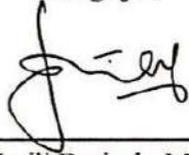
NIP : 197711032009122002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Devi Jihadillah Wibisono dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Gender Dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Pada Kompas.com dan Tempo.co” Telah dipertanyakan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji Skripsi pada Kamis, 20 Oktober 2022

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Laili Bariroh, M.Si

Penguji II



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

Penguji III



Holilah, S.Ag, M.Si

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A

Surabaya, 08 November 2022

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Abdul Chalik, M.Ag

NIP: 19730627000031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Jihadillah Wibisono  
NIM : I71217051  
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik  
E-mail address : Devijhwibi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Framing Pemberitaan Gender Dalam Pembahasan

Omnibus Law Cipta kerja Pada Komps.com dan Tempo.co

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2023

Penulis

( Devi Jihadillah Wibisono )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

**Devi Jihadillah Wibisono, 2022.** Analisis Framing Pemberitaan Gender Dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Pada Kompas.co dan Tempo.co ( Rentang Waktu dari 8 Januari – 24 April 2020 ), Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci : Media online, Framing, Omnibus Law, Perempuan**

Pemberitaan mengenai regulasi baru tidak jarang menuai kontra dari masyarakat, seperti dalam kasus Omnibus Law Cipta kerja ini yang dinilai tidak adil dan tidak ramah untuk perempuan. Adanya pertentangan dari rakyat salah satunya dapat dipengaruhi oleh media sebagai penyalur pesan, setiap redaksi memiliki ideologi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi sudut pandang masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik dan bertujuan untuk menganalisa sudut pandang Kompas.com dan Tempo.co dalam melakukan framing terhadap pemberitaan Gender pada pembahasan Omnibus Law melalui metode pendekatan framing. Dengan menggunakan teknik analisa framing dari Zhondang pan dan Gerald Kosicki yakni Sintaksis, Skrip, Tematik dan juga Retoris dalam menganalisa pemberitaan yang dimuat dalam media massa. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan berbagai literatur atau sumber yang relevan terhadap tema pembahasan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya peneliti melakukan gambaran mengenai situasi atau proses dari objek penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kompas.com, menyajikan berita yang memuat terkait isi kerugian yang terjadi pada buruh perempuan, dalam hal ini dari Struktur Sintaksisnya Kompas.com lebih menunjukkan sisi gendernya, pada struktur Skripnya Kompas juga memenuhi 5W + 1H dalam analisisnya juga tertera lengkap mengenai tuntutan para buruh, dalam Struktur Tematik, Kompas.com menuliskan realitas pada beritanya dengan cukup detail, Kompas memberi ruang kepada pihak lain untuk menanggapi tuntutan yang ada pada beritanya dalam hal ini Kompas.com menyajikan tanggapannya dari dua sisi yaitu buruh dan juga pemerintah dalam beritanya, dan dalam Struktur Retoris pemilihan kata yang dipakai lebih halus dan moderat.

Sedangkan pada Tempo.co, hanya menyajikan berita dengan berisikan kritikan saja karena hanya ada tanggapan dari pihak buruh saja, dalam Tempo.co pembahasan gender tidak difokuskan tetapi lebih condong membahas mengenai kerugian ekonominya. Dilihat pada Struktur Sintaksisnya Tempo.co menuliskan menyoroti fleksibilitas RUU Cipta kerja dalam bidang ekonominya, Tempo.co juga lebih sedikit mengutip pernyataan dari satu pihak yang terlibat saja yakni dari sisi wartawan saja, dalam Struktur Skrip tempo.co juga mencantumkan dengan unsur 5W+ 1H yang sudah tertera secara lengkap juga dengan membahas tentang tuntutan para buruh. Pada Struktur Tematik, tempo hanya menyoroti tanggapan dari satu pihak yakni penuntut atau para buruh. Dan Pada Struktur Retoris pemilihan kata yang dipilih oleh tempo.co lebih terkesan lebih negatif serta lebih ekspresif.

# DAFTAR ISI

<b>PROGRAM STUDI ILMU POLITIK</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Definisi Konseptual</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Analisis Framing</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Pengertian Gender</b> .....	<b>9</b>
<b>3. Keadilan dan Kesetaraan Gender</b> .....	<b>10</b>
<b>4. Omnibus Law</b> .....	<b>12</b>
<b>5. Kompas.com</b> .....	<b>14</b>
<b>6. Tempo.co</b> .....	<b>15</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>17</b>
<b>B. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>22</b>
<b>1. Konstruktivisme Media Massa</b> .....	<b>22</b>
<b>2. Konsep Keadilan Gender</b> .....	<b>26</b>
<b>C. Kerangka Berpikir</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	<b>33</b>

D. Sumber Data Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
1. Analisis isi framing.....	35
2. Dokumentasi.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>38</b>
A. Penyajian Data .....	38
1. Sejarah Kompas.com .....	38
2. Perbedaan Kompas.com dan Kompas.id.....	40
3. Visi & Misi Perusahaan .....	41
4. Struktur Organisasi Kompas.com .....	42
5. Alur Pemberitaan Kompas.com .....	46
6. Sejarah Tempo.co.....	47
7. Visi & Misi Tempo.co.....	50
8. Struktur Organisasi Tempo.co .....	51
9. Alur pemberitaan Tempo.co .....	55
G. Analisis Data .....	57
1. Analisis Framing Berita Kompas.com.....	60
2. Analisis Framing Berita Tempo.com.....	76
3. Analisis Perbandingan Framing Media Online Kompas.com dan Tempo.co Dalam Membingkai Berita Mengenai Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law.....	92
4. Analisis Framing dengan Konstruktivisme Media .....	95
5. Subjektivitas Media dan Omnibus Law Dalam Perspektif Keadilan Gender .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan investasi, termasuk membangun kembali regulasi perizinan berusaha. Rekonstruksi dilakukan agar dapat menuntaskan permasalahan pada bidang investasi, seperti proses perizinan yang dinilai cukup panjang, regulasi yang tumpang tindih, bahkan pada kebijakan ditingkat pusat dan daerah (*super regulation*). Sehingga, perlu adanya kelonggaran regulasi terkait perizinan usaha, syarat investasi, ketenagakerjaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembebasan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, realisasi proyek pemerintah, dan regulasi terkait dengan pengelolaan pemerintah dan sanksi pidana. Berbagai kendala yang ditentukan konstitusi. Jika proses deregulasi dilakukan seperti biasa atau dengan amandemen individu terhadap undang-undang yang ada, akan sulit untuk menyelesaikan proses deregulasi secara cepat dan tuntas.

Memasuki masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo, dalam rangka meningkatkan investasi dan perekonomian, pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan terobosan dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Sehingga pemerintah melakukan inisiasi untuk merumuskan Omnibus Law dengan tujuan menyederhanakan regulasi, Omnibus Law menjadi salah satu konsep hukum yang mencakup aturan dasar serta mengatur berbagai bidang yang sebelumnya diatur oleh banyak undang-undang sekaligus mengubah serta meringkas beberapa undang-undang. Pernyataan Undang-undang Omnibus law ini disampaikan Presiden Joko

Widodo pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR RI. Lima tahun ke depan, kedua undang-undang omnibus law ini akan dimasukkan dalam agenda prioritas ketiganya. Ia mengatakan segala bentuk regulasi pembatasan harus disederhanakan, harus dikurangi.

Melalui rilis pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/154/SET.MEKON.2.3/12/2019 pada 12 Desember 2019, pembahasan Omnibus law semakin lengkap. Pada tanggal 5 Desember 2019, RI mengesahkan UU Omnibus law tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan UU pemberdayaan UMKM yang akan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Menurut Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dua RUU Omnibus Law itu menjadi arahan bagi Presiden Jokowi untuk berbenah lingkungan investasi dan daya saing dalam berbagai peluang. Sampai pada tanggal 12 Februari 2020, draf RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah akhirnya selesai sehingga dilanjutkan dengan pembahasan RUU oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-13 pada 2 April 2020. Dari sejarahnya maka dapat ditarik konsep omnibus law ialah Untuk semua merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja, namun dalam satu aturan mengatur berbagai hal dan memiliki kuasa atas peraturan lain.<sup>1</sup>

Perlu diketahui bersama bahwasannya Omnibus Law Cipta lapangan kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, Undang-Undang ini dijelaskan dalam 15 bab 174 pasal yang memuat beberapa hal, seperti ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.<sup>2</sup> Fokus penelitian ini lebih pada UU Cipta lapangan Kerja. Dalam beberapa

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, "Omnibus Law : Metode Sakti Mengatasi Kebuntutan Praktik Berhukum.Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan".2020. Hlm 3

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh>. (diakses pada 16/10/20)

poin pada Omnibus law cipta kerja, tertera secara jelas bahwa Omnibus law merugikan kaum buruh apalagi kaum perempuan karena undang-undang ini jelas lebih berpihak pada investor dan juga kepentingan oligarki.

Perempuan menjadi topik pembahasan yang menarik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bentuk ketidakadilan dalam relasi kuasa atas laki-laki kepada perempuan sehingga menyebabkan ketidakadilan gender.<sup>3</sup> Fenomena ketidakadilan yang dialami perempuan bisa terjadi di mana saja, baik di ruang publik, sosial maupun privat. Dalam berbagai pandangan masyarakat atau sebagian Ulama Fiqih berpendapat bahwa posisi perempuan berada setelah laki-laki dalam ranah publik dan domestic, sehingga menyebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap perempuan dan laki-laki. Ironi yang terjadi saat ini adalah bentuk konkrit ketidakadilan gender, serta bentuk kesenjangan terhadap syariat sebagai tujuan pemahaman ulama dan umat dalam realita kehidupan.

Kesenjangan gender seperti ini terjadi pada Omnibus law UU Cipta kerja seperti berita yang dapat kita lihat diatas, bahwa perempuan tidak lagi mendapat keadilan. Keadilan yang di rasakan kaum perempuan pada kali ini tidak hanya dirasakan di sektor publik tetapi juga pada sektor domestik. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat wacana gender dalam UU Omnibus law ini karena banyak permasalahan dan ketidakadilan didalam UU yang baru disahkan pada 5 oktober 2020 lalu ini apalagi terhadap masa depan kaum perempuan yang telah termaginalkan.

---

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis (Bandung: Mizan, 2005), hlm 36

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat tema mengenai Omnibus law karena isu yang beredar terkait RUU Cipta kerja ini yaitu terkait kesejahteraan pekerja yang di tiadakan dan juga bentuk perizinan dalam membuka usaha yang dipermudah dalam perizinan amdal yang pasalnya dihapuskan dalam RUU Cipta kerja ini. Peneliti ingin melihat bagaimana perspektif media dalam merepresentasikan kebijakan yang disahkan pada 5 Oktober 2020 ini dan melihat apakah ada atau tidaknya pihak yang termaginalkan serta alasan yang melatarbelakanginya. Namun, sejak disahkannya RUU Omnibus Law tersebut banyak pro dan kontra yang ada ditengah masyarakat. Ini juga menunjukkan kekuatan dan kelemahan RUU sejak disahkan. Berbagai jenis materi mulai bermunculan di jejaring sosial, mulai dari warga sekitar, mahasiswa, hingga aksi protes yag dipimpin oleh buruh. Maka dari itu dibutuhkan media sebagai sarana komunikasi. Media massa merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi. Media massa sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, sangat heterogen dan dapat mempengaruhi perspektif masyarakat selaku pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa ialah sarana komunikasi untuk memperluas berita dan menyampaikan pesan kepada pembaca.<sup>4</sup> Cangara berpendapat bahwa media merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dari penyebar kepada khalayak, sedangkan media massa merupakan sarana untuk menyebarkan informasi dari sumber kepada khalayak melalui alat komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar dan film.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka.

<sup>5</sup> Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hal 123-126

Media online menjadi salah satu alat yang mempermudah pencarian informasi. Media online merupakan media berbasis pada internet, secara awam orang akan berfikir sama seperti media elektronik, namun pakar membedakan dalam kelompok tersendiri, karena media online menggabungkan media cetak dengan menulis informasi yang kemudian disalurkan melalui sarana elektronik, tetapi juga tetap dapat berkomunikasi secara personal atau perorangan.<sup>6</sup> Realitanya muatan konten media massa memiliki *framenya* tersendiri. Analisis framing dilakukan untuk analisa terkait bagaimana media berita memaparkan sebuah realita atau peristiwa. Analisis bingkai atau metode analisis framing adalah cara yang peneliti gunakan dalam mengamati proses pembingkai realita yang ada dan publikasi oleh media atau bagaimana media menjelaskan suatu realita. Hal ini didasarkan pada ciri khas yang dimiliki oleh media massa karena dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya ialah keterlibatan pemimpin media massa untuk memberikan pengaruh terhadap pemberitaan politik yang dimuat pada media cetak, elektronik, begitu juga media online. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa pemberitaan dalam media massa juga menyangkut kepentingan politik tertentu. Dengan adanya kepentingan tertentu pada media massa juga turut serta mempengaruhi muatan berita yang disampaikan dan fakta yang ada kemungkinan bukanlah fakta yang objektif, melainkan fakta yang telah dikonstruksi menurut kepentingan tertentu.<sup>7</sup>

Analisis framing bertujuan untuk menganalisa konstruksi realita yang dilakukan oleh media berita dalam memaparkan sebuah isu atau peristiwa, sehingga dapat diketahui cara dan teknik yang digunakan dalam paparan berita media massa. Dalam melakukan analisis framing, Hal pertama yang dilakukan adalah memahami

---

<sup>6</sup> Akbar.Ali S.T.Menguasai Internet Plus Pembuatan Web. (Bandung: M2S.2005). Hlm. 13

<sup>7</sup> Sudibyo agus, Politik Media dan Pertarungan Wacana. (Yogyakarta; LkiS, 2001). hlm 11

muatan media dalam membingkai sebuah kasus. Bagaimana sebuah realitas dibentuk dengan perspektif pemberitaan pihak media massa, sebab setiap media dapat memberikan sikap dukungan atau kritik terhadap suatu peristiwa baik itu negatif atau positif menurut frame yang digunakan oleh media. Media dapat menyajikan sebuah realitas yang ada, namun dalam kontruksi dan bingkai penjelasan yang berbeda.<sup>8</sup> Dalam analisis framing, acuannya adalah bagaimana media menginterpretasikan, memahami, dan membingkai realitas dalam konten yang disajikan. Dengan analisis framing diharapkan dapat melihat cara media memuat berita yang ditonjolkan dan dibuang, serta proporsi pembahasan yang diberitakan dan bagian tidak dimuat dalam berita.

Peneliti juga tertarik untuk mengkaji berita terkait Gender dalam Omnibus Law Cipta kerja yang ada pada dua portal berita online yaitu Kompas.com dan Tempo.co, sebab media tersebut cukup diketahui dan dibaca banyak orang. Oleh karena itu, untuk dapat melihat pandangan dan ideologi dari kedua media tersebut dalam pemberitaan mengenai gender dalam Omnibus law maka dilakukanlah analisis, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis framing dari model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang akan ditinjau dalam struktur Sintaksis, Skrip, Tematik dan Retoris dengan menggunakan media berita online sebagai subjeknya, peneliti ingin mengembangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa yang telah diframing oleh Kompas.com dan Tempo.co mengenai Omnibus Law dan mengangkat judul Analisis Framing Pemberitaan Gender Dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Pada Kompas.com dan Tempo.co (Rentang Waktu dari 8 Januari – 24 April 2020).

---

<sup>8</sup> Eriyanto. Analisis wacana: Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta: LKIS.2006). hal 3-4

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Bagaimana wartawan dan media membingkai suatu peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. Sehingga muncul pertanyaan, tentang Bagaimana Kompas.com dan Tempo.co membingkai pemberitaan gender dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Kompas.com dan Tempo.co dalam kerangka pemberitaan Gender dalam pembahasan Omnibus Law melalui metode pendekatan framing.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat untuk kajian ilmu komunikasi terkait dengan analisis framing, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya. Framing (bingkai) memberi tekanan lebih terhadap teks yang disajikan pada media cetak (surat kabar harian) terkait hal yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat berita.

### **2. Manfaat Sosial**

Manfaat sosial diharapkan dapat membuat informasi lebih jelas, berarti, atau mudah dimengerti oleh masyarakat. Informasi yang menonjol memungkinkan mudah diterima oleh pembaca dalam muatan berita media online, serta membuat

pembaca lebih mudah dalam mengakses berita, pembaca lebih merasa tertarik dalam membaca dan juga pembaca dapat mengakses berita lebih dari satu kali.

### 3. Manfaat Praktis

Memaparkan data terkait model framing oleh kompas.com serta Tempo.co. Selain itu diharapkan dapat mempengaruhi perspektif masyarakat agar lebih netral dalam menanggapi pemberitaan Omnibus Law Cipta Kerja. Agar masyarakat tidak hanya terfokus pada satu media berita, namun juga melihat pemberitaan yang dilakukan oleh media online lain.

## E. Definisi Konseptual

### 1. Analisis Framing dan Konstruksi Media Massa

Framing merupakan metode mengamati media dalam membentuk dan mengkonstruksi realita. Fakta-fakta dikumpulkan dan dijelaskan, kemudian dijelaskan oleh peneliti. Melalui interpretasi akan diperoleh makna implisit (*invisible meaning*) dalam teks. Dalam kerangka, teks berita memiliki banyak perangkat retorik, yang akan melakukan interaksi terhadap memori pembaca dalam proses membangun sebuah makna.<sup>9</sup>

Analisis Framing adalah sebuah cara untuk melihat keterkaitan berita dan ideologi, yaitu bagaimana berita membentuk, memelihara, memproduksi, mengubah dan menghancurkan proses atau mekanisme ideologi. Dalam penelitian framing, yang menjadi inti dalam sebuah persoalan adalah bagaimana realita atau peristiwa dipaparkan oleh media. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai sebuah peristiwa dalam konstruksi tertentu. Sehingga ini bukan tentang baik buruknya sebuah media, namun bagaimana kerangka yang dikembangkan oleh media dalam

---

<sup>9</sup> Sobur. Analisis teks: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing. (Bandung: Remaja, 2001). hlm 186

membangkitkan sebuah realita.<sup>10</sup> Konstruksi dan interpretasi teks berita memiliki makna tertentu, dan akibatnya isi berita tersebut bermanfaat bagi suatu aspek tertentu. Terdapat dua aspek dalam sebuah kerangka: Pertama, memilah fakta/realita. Saat mencari sebuah fakta, ada kemungkinan memilih atau membuang suatu realita, dan aspek tertentu juga ditekankan dengan sudut pandang, fakta tertentu, dan melupakan aspek lain. Oleh karena itu, struktur peristiwa berbeda satu sama lain. Kedua, tuliskan fakta. Prosesnya melibatkan menunjukkan fakta-fakta terpilih kepada publik. Dibandingkan dengan aspek lainnya, beberapa aspek disorot untuk menarik perhatian. Realitas yang menonjol lebih cenderung diperhatikan dan memengaruhi pemahaman penonton tentang realitas.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Gender

Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*gender*". Dalam kamus bahasa Inggris, tidak ada perbedaan yang jelas antara gender dan gender. Secara umum gender diidentikan dengan seks. Oleh karena itu, kajian analisa gender menjadi kajian yang penting dalam ilmu sosial. Jaya Suprana mendefinisikan, gender adalah suatu bentuk jenis mazhab keyakinan kultural tentang eksistensi biologis seyogyanya hanya dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, yang ditentukan secara ragawi pada setiap insan manusia sejak lahir.<sup>12</sup>

Perbedaan laki-laki dan perempuan menurut sex atau jenis kelamin merupakan suatu kodrat atau ketentuan Tuhan. Karena alat laki-laki dan perempuan tidak pernah berubah dan bersifat permanen, karakteristik biologis yang unik dari setiap jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan. Hal tersebut berbeda dengan gender.

---

<sup>10</sup> Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta : LKIS Group,2002) hlm 7

<sup>11</sup> Ibid, hal 82.

<sup>12</sup>Jaya Suprana, Kelirumologi Genderisme (Jakarta:PT Gramedia, 2014). hlm 3

Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya dimana laki-laki dan perempuan dibedakan menurut perannya masing-masing, seperti peran, tipe, status, dan posisi dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh budaya lokal. Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologis.<sup>13</sup> Laki-laki adalah manusia yang bercirikan memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing), dan menghasilkan sperma. Perempuan memiliki organ reproduksi seperti rahim dan saluran tuba untuk memproduksi telur, memiliki vagina, dan alat menyusui.

### 3. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Perbedaan jenis kelamin menghasilkan perbedaan gender, dan perbedaan gender menghasilkan ketidakadilan. Pemicu ketidaksetaraan gender adalah hasil dari bagaimana gender dikonstruksi secara sosial dan budaya. Ketidakadilan ini bermula dari kegagalan untuk menegakkan hak asasi manusia bagi perempuan atau laki-laki. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menentukan nasib sendiri.

Terdapat beberapa definisi keadilan dan kesetaraan gender yang dikemukakan oleh beberapa penulis. Keadilan secara bahasa berasal dari akar kata adil (*just, fair, equitable, legal*) dan berarti membela dan berpihak pada kebenaran, atau sifat, perilaku dan perlakuan yang adil. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil. Kesetaraan berasal dari kata setara (*matcing, equal*), sepadan sejajar (sama tingginya) dan seimbang.<sup>14</sup> Jadi dalam pembahasan keadilan gendertersirat suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender berarti tidak ada standarisasi peran, tidak ada beban ganda, subordinasi, tidak

---

<sup>13</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). hlm 7

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Edisi ketiga), hal. 8.

ada pengecualian, dan tidak ada kekerasan terhadap perempuan atau laki-laki.<sup>15</sup> Keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati haknya sebagai manusia, sehingga keduanya dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian sosial atas persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipandang sama termasuk peran mereka.<sup>16</sup>

Dalam konteks omnibus law keadilan serta kesetaraan gender dinilai sangat rendah. Karena terkesan hanya melayani kepentingan pengusaha dengan mencekik hak-hak yang seharusnya dimiliki pekerja, antara lain status kontrak tanpa batas, penghapusan perlindungan upah dan PHK, serta pemotongan jumlah pesangon. Lebih buruk lagi, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur cuti menstruasi dan keguguran. Draft RUU Cipta Kerja yang diketahui oleh masyarakat diyakini sebagai draft yang telah diajukan oleh Pemerintah ke DPR RI pada 12 Februari 2020, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa negara sengaja mengabaikan kelompok perempuan. Penyebutan perempuan hanya ditemukan pada Pasal 153 ayat (1) huruf E tentang larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh perempuan yang hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Jika hal ini dimaksudkan sebagai ketentuan untuk memajukan perlindungan dan kesehatan pekerja, khususnya pekerja perempuan. RUU tersebut tidak menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini. Di Indonesia, ketentuan yang melarang pemberhentian pekerja yang hamil, melahirkan, hamil atau menyusui merupakan bagian dari peraturan ketenagakerjaan. Namun faktanya, kasusnya terus terjadi. Seperti yang menimpa perempuan buruh PT Arnotts yang mengalami PHK

---

<sup>15</sup>Mansour Fakih, Op.Cit.12

<sup>16</sup> Hamdanah, Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak. (Jogjakarta: BIGRAF Publishing. 2005), hal. 249.

massal pada 2018 lalu. Seorang ibu hamil anggota serikat buruh ditawari surat pengunduran diri secara sukarela. Saat menolak, kemudian sang ibu mendapat surat penunjukan PHK. Pihak manajemen secara jelas mengatakan “Siapa bilang kami tidak bisa PHK orang hamil? Kami main cantik kok”.<sup>17</sup> Rumusan pengaturan ini selain hanya basa-basi juga tidak didasarkan pada bacaan analisis lapisan relasi kuasa antara pengusaha dengan buruh perempuan.

RUU Cipta Kerja secara tidak langsung berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan dan penguatan ketimpangan gender. Ancaman perampasan sumber agraria, perusakan pangan dan lingkungan, tidak hanya mengancam kedaulatan perempuan atas penghidupannya, tetapi juga pengetahuan dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan kelangsungan hidup perempuan.

#### **4. Omnibus Law**

Di tengah kekhawatiran menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. Dua dari sembilan fraksi Partai menolak pengesahan yakni Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat. Sejak di sahkan DPR, saat ini, bola panas ada di Presiden. Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menekan atau tidak menekan sesuai Pasal 73 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Hal ini didasarkan karena RUU ini hanya dibahas sebanyak 64 rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020 dan pada 5 Oktober 2020 disahkan. Proses legislasi dinilai tergesa-gesa, tidak transparan dan partisipatif sehingga menimbulkan citra buruk yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses penyusunan UU Cipta Kerja. UU cipta

---

<sup>17</sup>[www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org), diakses pada tanggal 29 desember 2020

kerja merupakan upaya dalam revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak 2006 yang berusaha direvisi oleh pemerintah dan terus digagalkan gerakan buruh. Sistem fleksibilitas dalam peraturan tenaga kerja yang diandalkan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan Bank Dunia merupakan fitur utama klaster ketenagakerjaan RUU Cipta lapangan kerja yang menjadi lisensi dalam kemudahan rekrutmen dan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK (*easy hiring easy firing*). Sehingga nantinya pekerja/buruh dapat digaji dengan murah sesuai hitungan upah per jam dan pembayaran gaji di bawah standar minimum adalah hal yang legal, serta status dan kepastian kerja menganut sistem outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu. Dalam kasus ini kelompok yang sangat dirugikan adalah pekerja perempuan yang diupah per jam.<sup>18</sup>

Omnibus Law sendiri dimaknai sebagai cara untuk mengganti atau mencabut dan menata ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang menjadi satu (subjek) hukum. Menurut Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja), penciptaan lapangan kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan dan otorisasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi. Istilah Omnibus Law banyak digunakan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikannya dalam pidato pengukuhan pada 20 Oktober 2019. Presiden akan mengusulkan dua Undang-undang Omnibus law, UU Penciptaan Lapangan Kerja dan UU Otorisasi UMKM. Omnibus law mengandung banyak arti tergantung pada penggunaannya di berbagai negara, dan istilah tersebut digunakan ketika membahas RUU di Parlemen. Di Indonesia Omnibus Law dipahami sebagai cara

---

<sup>18</sup>Sjaiful, M. "Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Media Iuris*, 2020. 4(1), 37-60

merumuskan regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subjek atau subjek dengan tujuan tertentu agar menyimpang dari norma regulasi. Dalam Naskah Akademis Draf RUU Cipta Kerja (11/2/2020) disebutkan bahwa Undang-Undang Omnibus mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi ini memang belum banyak dikenal di Indonesia.<sup>19</sup> Pembentukan RUU Cipta Kerja diperlukan adanya upaya dalam menyeimbangkan pendapat seluruh pihak untuk memberikan aspirasinya mengenai tujuan dari pembentukan peraturan sehingga peraturan yang sudah dilakukan pembentukan dapat diterima dan berlaku bagi seluruh kalangan.<sup>20</sup>

## 5. Kompas.com

Kompas.com merupakan sebuah portal web yang memuat berita dan artikel online di Indonesia. Kompas.com adalah salah satu situs berita yang populer di Indonesia. Berbeda dari situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Namun, kompas.com merupakan yang terdepan dalam hal memberitakan beritaterbaru (*breaking news*) sejak tahun 1995, kompas.com merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Perjalanan bisnis Kompas Gramedia tiba pada kondisi kesulitan untuk mendistribusikan harian kompas keseluruhan Indonesia karena kendala geografis, dan diluar negeri juga terlambat mendapatkan informasi dari Harian kompas.com ditambah lagi, tren dimasyarakat yang menunjukkan fenomena meningkatnya penggunaan jaringan internet untuk mendapatkan informasi. Sehingga Harian Kompas membuat versi online dari edisi cetaknya yang disebut Kompas

---

<sup>19</sup><https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/apa-itu-omnibus-law> (diakses pada 17/10/2020)

<sup>20</sup> W.J.S. Purwadaminta, Kamus umum bahasa indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka Halaman,2006), hlm 847

online dengan alamat <http://www.kompas.co.id> pada 14 september 1995. Sedangkan domain dot comnya sendiri baru diregistrasi 18 desember 1995. Awal tahun 1996 Kompas online (Kompas.co.id) resmi beralamat menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com).<sup>21</sup>

## 6. Tempo.co

Tempo.co merupakan sebuah portalweb berita dan artikel daring yang didirikan oleh PT Tempo Inti Media, Tbk. Isi berita dibagi berdasarkan jenis-jenis berita, antara lain: nasional, metro, bisnis, olahraga, teknologi, gaya hidup, internasional, senidan hiburan, selebritas, dan otomotif. Tempo.co didirikan pada tahun 1996 oleh Yusril Djalinus, Bambang Bujono, S. Prinka, dan Saiful B. Ridwan dengan nama Tempo interaktif. Sebelumnya, PT Tempo Inti Media, Tbk. pernah mencetak majalah mingguan Tempo yang pernah mengalami pemberedelan sebanyak dua kali pada masa Orde Baru.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>21</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/12371281/kompascom-dan-14-september-1995> (diakses pada 17/10/2020 pukul 16:52)

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, penyimpanan data, analisis data, penutup atau kesimpulan. Yang diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan yang memuat berisi: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Konseptual.

### **BAB II : LANDASAN TEORITIK**

Membahas tentang Landasan teoritik yang meliputi kajiankepustakaan serta teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teori konstruktivisme media massa

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini berisi tentang jenis penelitian yang dipakai, lokus serta waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Penyajian data ialah deskripsi subjek penelitian, dalam deskripsi subjek yang dijelaskan ialah Kompas.com dan Tempo.co merupakan portal berita online yang menjadi objek penelitian. Analisis data berupa pemaparan data yang diperoleh dari proses mengkaji dan menganalisis data penelitian menggunakan analisis framing serta mengaitkan wawasan tersebut dengan teori yang digunakan..

### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan penutup memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk menghindari persamaan pembahasan pada penelitian ini adalah:

- M. Mahbub Al Basyari, skripsi dengan Judul “Framing Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji 2008/1429 H di Harian Kompas dan Republika Edisi Desember 2008”<sup>22</sup>

Hasil dalam penelitian M. Mahbub Al Basyari membahas tentang frame dari dua media massa yaitu, Kompas dan Republika. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis framing model Robert Entman. Terdapat perbedaan dalam membingkai pelaksanaan ibadah Haji tahun 2008/1429 H di dua media massa yang menjadi objek penelitian, terkait muatan berita yang ditampilkan kepada khalayak. Dalam frame pemberitaannya, Kompas menilai bahwa pemberitaan yang disampaikan berdasarkan sudut pandang politik, berbeda dengan Republika yang melihat menurutsudut pandang kesejahteraan para calon jamaah haji.

- Hajerimin, skripsi dengan judul “Analisis Framing Media Massa (Konstruksi Berita Politik Harian Amanah Tentang Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar Jelang Pilgub Sul-Sel 2018: Studi Analisis Framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki).”<sup>23</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui analisis framing (bingkai/pengemasan) berita politik harian Amanah tentang Abdul Aziz Qahhar

---

<sup>22</sup> <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3724/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<sup>23</sup> <https://dokumen.tips/documents/analisis-framing-media-massa-konstruksi-berita-politik-jika-dikemudian.html?page=1>

Mudzakkar menjelang Pilgub Sul-Sel 2018, 2) untuk mengetahui analisis agenda setting harian Amanah terhadap berita politik tentang Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar menjelang Pilgub Sul-Sel 2018. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu analisis yang melihat wacana sebagai hasil dari konstruksi realitas sosial. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis framing (framing analisis) dengan literatur representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

- Skripsi oleh Onny Safwedha dengan judul “Konstruksi Realitas Media Massa Tempo Dan Republika Dalam Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama Pasca Pilkada Putaran Pertama DKI Jakarta 2017.”<sup>24</sup>

Penelitian oleh Onny menggunakan metode kualitatif deskriptif dan paradigma konstruktivis. Penelitian ini dilakukan dengan analisis framing Robert N. Entman. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ketetapan redaksional setiap media mampu berpengaruh terhadap sudut pandang yang diambil dalam pemberitaan sebuah peristiwa. Hasil penelitiannya juga menemukan Tempo cenderung menyajikan informasi berimbang dari kedua pihak. Sedangkan Republika cenderung mendukung salah satu pihak, karena mengutamakan pemberitaan yang Islami. Dalam penelitian ini membahas tentang Basuki Tjahaja Purnama.

- Skripsi oleh Fahmi dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka Dan CNN Indonesia Dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme Oleh BNPT.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.semanticscholar.org/paper/KONSTRUKSI-REALITAS-MEDIA-MASSA-TEMPO-DAN-REPUBLIKA-Safwedha-Suprihatini/321d0c0559d06e0054cb753df26be0dc5f755d38>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara aktual dan rinci sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang ada, melakukan identifikasi masalah dan membandingkan atau evaluasi. Teori yang digunakan dalam penelitian Fahmi adalah teori kontruksi sosial atas realitas menurut konsep analisis framing, Robert N. Entman. Dalam model ini terdapat 4 elemen yang digunakan yaitu, *define problems, diagnose causes, make moral judgement dan treatment recommendation*. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya perbedaan yang menonjol dalam pengemasan berita terkait isu pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan paham radikal. Perbedaan tersebut terlihat dari judul berita CNN Indonesia yang cenderung mencari aman dalam membuat judul yaitu dengan menggunakan kalimat langsung. Karena menurut CNN Indonesia isu tersebut termasuk isu yang sensitif sementara itu Rmol.co membuat judul berita yang menggunakan kalimat yang kontroversi dan bombastis.

- Tahrifudin, skripsi dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Berita Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Di Media Kompas.Com Dan Republik Online.”<sup>26</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kompas.com dan republika.co.id mengemas berita tentang Haluan Ideologi Pancasila. Model analisis Framing yang digunakan adalah teori Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Perbedaan pembedaan berita yang dimunculkan oleh kompas.com dan republika.co.id paling jelas terlihat pada perbedaan narasumber. Republika Online

---

<sup>25</sup> <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33632/1/FAHMI%20-FDK.pdf>

<sup>26</sup> [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9457/2/TAHRIFUDIN\\_ANALISIS%20FRAMING%20PEMBERITAN%20MEDIA%20ONLINE%20MENGENAI%20BERITA%20RANCANGAN%20UNDANG-UNDANG%20HALUAN%20IDIOLOGI%20PANCASILA%20DI%20MEDIA%20KOMPAS.COM%20DAN%20REPubLIKA%20ONLINE.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9457/2/TAHRIFUDIN_ANALISIS%20FRAMING%20PEMBERITAN%20MEDIA%20ONLINE%20MENGENAI%20BERITA%20RANCANGAN%20UNDANG-UNDANG%20HALUAN%20IDIOLOGI%20PANCASILA%20DI%20MEDIA%20KOMPAS.COM%20DAN%20REPubLIKA%20ONLINE.pdf)

dipandang sebagai media yang bernuansakan islam selalu memilih narasumber yang memiliki pemikiran islami.

- Skripsi oleh Suhaimah dengan judul “Analisis Framing Tribunnews.Com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online Tahun 2019.”<sup>27</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media tribunews.com membingkai suatu berita tentang penangkapan Vanessa Angel dalam prostitusi online. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori analisis framing yang dikemukakan oleh Zhondang dan Pan Kosicki. Hal ini terlihat dari bagaimana peneliti menganalisis pembingkai berita melalui analisis framing dengan metode Zhondang Pan dan Kosicki untuk melihat cara tribunews.com dalam mengemas kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dengan mengambil 13 berita, peneliti melihat bahwa tribunews.com melakukan pembingkai kasus prostitusi online yang mengarahkan pemberitaannya kepada penegakan hukum akan tetapi setelah diteliti melalui struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik terlihat sekali jika tribunews.com ingin menyudutkan dan memojokkan Vanessa Angel yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut, hal ini dilihat dari cara tribunews.com menyusun fakta-fakta yang disajikan.

- Skripsi oleh Rahmi Azrina Putri Pasaribu dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Pada Media Online Dan Streotype Terhadap Beauty Pageant.”<sup>28</sup>

Penelitian dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Pada Media Online Dan Streotype Terhadap Beauty Pageant (Analisis Framing Zhong Dang Pan Dan

---

<sup>27</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/21183/9/SKRIPSI%20LENGKAP%20SUHAIMAH.pdf>

<sup>28</sup> <http://repository.uinsu.ac.id/13234/1/SKRIPSI%20AMY%20TERBARU.pdf>

Gerald M. Kosicki) bertujuan untuk memaparkan kontes kecantikan yang kerap melibatkan para perempuan berfisik nyaris sempurna agar menjadi sebuah kontroversi di Indonesia dan bertujuan mengetahui bagaimana sintaksis, skrip, tematik dan retorik dalam pembingkaiannya suatu berita, bagaimana stereotype yang timbul terhadap Beauty Pageants. didalam penelitian ini juga melampirkan respon masyarakat di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube terhadap isu yang diberitakan. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan berita teks online dari Brilio.net yang menjadi perusahaan paling dominan di bidang penerbitan konten digital untuk pembaca muda di Indonesia dan stereotype yang ada di pemberitaan Kumparan Style.

- Skripsi oleh Vichar Pratama Putra dengan judul “Pembingkaiannya Berita Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Atas Kritik Media Massa Di Media Online Sindonews.Com Dan Vivanews.Co.Id Edisi Agustus 2015).”<sup>29</sup>

Penelitian ini menganalisa 14 berita dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis framing model Zhong Pan dan Gerald M. Kosicki serta paradigma konstruksionis. Dalam proses penelitian menemukan bahwa framing dari kedua media sangat berbeda. Seperti Sindonews.com melakukan framing pemberitaan Jokowi dengan bermuatan kritik yang terkesan kurang objektif dan cenderung menggunakan narasumber yang kontra dengan Jokowi, sehingga hal ini menjadi bagian dari kepentingan pemilik media, berbeda dengan Sindo, Viva dalam framingnya cenderung berupaya menjaga objektivitas pada pemberitaannya demi menghasilkan informasi yang sesuai dengan realita yang ada.

---

<sup>29</sup> <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10193/FIX%20SKRIPSI%20SIDANG.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih membahas Omnibus Law dari sisi yang berbeda dan lebih eksplisit yakni mengenai Omnibus law UU cipta kerja dalam perspektif gender, penelitian ini melihat bagaimana Omnibus law UU cipta kerja memperlakukan pekerjanya terutama kaum perempuan. Penelitian ini juga menggabungkan ilmu politik dengan ilmu komunikasi dengan mengangkat judul Analisis Framing Pemberitaan Gender Dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Pada Kompas.com dan Tempo.co dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, serta melihatnya dari dua portal berita yang ternama yakni Kompas.com dan Tempo.co tentu dengan sudut pandang yang berbeda pula kedua portal berita tersebut dalam membingkai suatu realita atau peristiwa. Serta dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana subjektivitas suatu media yang dalam hal ini adalah Kompas.com dan Tempo.co dan Omnibus Law dalam perspektif teori keadilan gender. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang dipakai, jumlah berita yang akan di teliti dan juga jenis portal berita yang dipilih. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama – sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, Analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis framing, dan juga dianalisis dengan analisis konstruktivisme media.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Konstruktivisme Media Massa**

Dalam Ilmu Komunikasi ada lima paradigma penelitian komunikasi, antara lain : (a) Paradigma Positivis, (b) Paradigma Postpositivis, (c) Paradigma Konstruktivis, (d) Paradigma Kritis, dan (e) Paradigma Partisipatoris. Konsep

konstruktivisme pada awalnya dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Berger melihat realitas kehidupan sehari-hari dalam dimensi subjektif dan objektif. Bagi Berger dan Luckman, paradigma realitas kehidupan salah satu perspektif atau sudut pandang dalam melihat gejala atau realita sosial. Konsep Konstruktivisme sejalan dengan konsep konstruksi realitas sosial, konstruksionisme, konstruktivis sosial, konstruksionis sosial. Dalam hal ini bisa disebut sebagai konsep konstruksi sosial (social construction).

Berger dan Luckman menyatakan, konstruksi media atau realitas terjadi secara stimulan melalui tiga tahapan, yaitu tahap eksternalisasi, objektivasi, dan tahap internalisasi. Paradigma konstruktivisme oleh Peter L. Berger dan Luckmann kemudian dikenal dengan teori konstruksi realitas sosial atau teori dialektika. Mereka menjelaskan bahwa proses sosial didapatkan melalui aksi dan interaksi yang diciptakan oleh individu secara terus menerus secara periodik sehingga membentuk suatu realitas yang dimiliki oleh individu. Pendapat lain oleh Goffman lebih menilai bahwa konsep konstruksi sosial atas realitas itu sederhana.<sup>30</sup>

Teori konstruktivisme adalah pandangan yang melihat kebenaran realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran realitas sosial bersifat relatif. Konstruktivisme adalah studi tentang bagaimana struktur berpikir manusia dibangun dari waktu ke waktu sehingga jaringan saraf yang dilatih untuk melakukan tindakan simbolik tertentu mengkondisikan tindakan selanjutnya.<sup>31</sup>

Pendekatan konstruktivis memiliki dua karakteristik penting. Pertama, menekankan politik makna dan proses yang membentuk gambaran realitas. Makna tidak mutlak, melainkan merupakan konsep statis yang terdapat dalam sebuah

---

<sup>30</sup> Karman, Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realita Peter L. Berger), Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol 5 No.3 (Jakarta:2015) hal 21

<sup>31</sup> Stephen W little Jhon, Ensiklopedia Teori Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2016), hal.216

pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang terhadap sebuah pesan. Kedua, pendekatan konstruktivis memandang aktivitas komunikatif sebagai proses yang dinamis. Pendekatan konstruktivis mempelajari bagaimana pesan terbentuk di sisi pengirim, dan di sisi penerima, bagaimana individu membangun makna saat menerima pesan.

Pesan dipandang bukan sebagai *mirror of reality* yang menampilkan fakta apa adanya. Secara esensial, pendekatan konstruktivis pada media, wartawan dan berita dirangkum dalam 6 perspektif, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Fakta dan peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi konstruktivis, realitas adalah subjektif. Realitas ada karena diciptakan dan dihadirkan oleh konsepsi subjektif jurnalis. Realitas diciptakan oleh konstruksi, sudut pandang khusus jurnalis. Tidak ada realitas objektif di sini. Karena realitas diciptakan oleh struktur dan perspektif tertentu. Realitas dapat berbeda tergantung pada bagaimana wartawan dengan pandangan yang berbeda memandang konsep realitas.
- 2) Media adalah perusahaan konstruksi. Dari perspektif konstruktivis, media bukanlah saluran bebas. Media juga menjadi subjek atau aktor yang berkontribusi pada konstruksi realitas melalui pandangan, prasangka, dan orientasi mereka. Di sini media dilihat sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan ini menolak argumen bahwa media dianggap sebagai saluran bebas. Berita yang kita baca tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi media itu sendiri.

---

<sup>32</sup> Eriyanto. Analisis Wacana. (Yogyakarta: LKiS, 2003) hal 40-41

- 3) Berita hanyalah konstruksi realitas, bukan cerminan realita. Berita diibaratkan seperti drama. Alih-alih menggambarkan realitas, itu adalah potret panggung pertempuran antara berbagai pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
- 4) Berita adalah realitas subjektif. Berita subjektif datang dari sisi berlawanan dari jurnalis, sebagaimana wartawan sendiri melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri dan berbagai pertimbangan subjektif.
- 5) Jurnalis adalah agen pembangun realitas, bukan reporter. Menurut pandangan konstruktivis, jurnalis adalah bagian integral dari pembentukan berita sehingga mereka tidak dapat menyembunyikan pilihan atau bias moral mereka. Berita bukanlah produk tunggal, itu adalah bagian dari proses organisasi dan interaksi jurnalis di dalam media.
- 6) Etika jurnalis, pilihan moral, dan keberpihakan adalah bagian integral dari produksi berita. Dalam banyak hal, etika dan moralitas menyiratkan advokasi kelompok atau nilai-nilai tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan dan konstruksi realitas sosial.

Berger dan Luckman mendefinisikan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan sehingga memiliki makna bahwa realitas sebagai kualitas yang terdapat didalam realitas, yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak bergantung pada kehendak kita sendiri. Sementara, pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik secara spesifik. Masyarakat dan institusi sosial tampak ada secara objektif, tetapi pada kenyataannya semuanya dikonstruksikan dengan definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru dapat muncul dengan mengulangi afirmasi yang diberikan oleh orang lain dengan definisi subjektif yang

sama. Pada tingkatan generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan.<sup>33</sup>

Dalam pandangan konstruksionis, tidak ada realitas inheren yang tampak ada seolah-olah ada dan ajeg atau tetap, sebelum peneliti mendekatinya. Yang ada sesungguhnya konstruksi atas suatu realitas. Realitas sosial tergantung pada bagaimana seseorang memahami dan menafsirkan dunia. Interpretasi dan pemahaman itulah yang disebut sebagai realitas. Karena itu, peristiwa dan realitas yang sama dapat menghasilkan konstruksi masyarakat yang berbeda oleh orang yang berbeda. Definisi orang tentang realitas yang menunjukkan bagaimana realitas dipahami atau bagaimana dunia ditafsirkan.<sup>34</sup>

## **2. Konsep Keadilan Gender**

Permasalahan gender di masyarakat sudah ada sejak manusia ada di muka bumi. Isu gender kini menjadi perhatian dunia. Munculnya kepedulian terhadap isu gender ini bertepatan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan stabilitas menuju kemakmuran dan keadilan atau produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Munculnya pergeseran paradigma pembangunan tersebut akan menjadi landasan untuk mengatasi masalah ketimpangan gender yang masih terjadi di masyarakat menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan kalimat yang mencakup dua istilah: kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender

---

<sup>33</sup> Alex Sobur, Analisis Teks Media: suatu pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Hlm. 91.

<sup>34</sup> Eriyanto, Op.cit, hlm 52

mengacu pada kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak untuk memenuhi peran kemanusiaan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan nasional, dan itu berarti kesetaraan dalam penggunaan hasil pembangunan. Keadilan gender adalah proses bersikap adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai ini, harus menemukan cara untuk menghentikan hambatan sosial dan sejarah yang menghalangi perempuan dan laki-laki memainkan peran mereka dan menikmati konsekuensi dari peran mereka. Studi gender lebih memperhatikan aspek maskulin atau feminin seseorang. Peran gender tidak sendirian, tetapi terkait tidak hanya dengan perbedaan fisik dan biologis, tetapi juga dengan identitas dan karakteristik berbeda yang dianut masyarakat untuk laki-laki dan perempuan karena ketidaksetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi semua nilai sosial budaya hidup dan berkontribusi pada masyarakat.<sup>35</sup>

Adanya perbedaan gender tidak terlalu menjadi masalah kecuali mengarah pada ketidaksetaraan gender (*gender quality*). Masalah yang muncul adalah perbedaan gender menciptakan tingkat ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan khususnya sistem dan struktur. Ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam banyak cara: marginalisasi atau kemiskinan ekonomi, subordinasi atau praduga yang tidak berarti dalam keputusan politik, stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), lebih lama Beban kerja (*burden*) yang lebih tinggi, dan sosialisasi ideologi nilai peran gender. Ketidaksetaraan gender merupakan suatu

---

<sup>35</sup> Narasudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*, (Jakarta: Paramadina. 1999), hal.75.

sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Beberapa gejala yang muncul dari adanya ketidaksetaraan gender adalah:<sup>36</sup>

### 1. Marginalisasi

Problematika pada negara yang dilanda kemiskinan merupakan dampak dari marginalisasi kepada laki-laki dan perempuan, sebagai akibat perbedaan sifat dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme eksklusi perempuan. Perbedaan gender jika dicermati berasal muncul dari kebijakan, kepercayaan, tafsir, budaya lokal serta hipotesis ilmiah.

### 2. Subordinasi

Subordinasi berasal dari sudut pandang gender terhadap perempuan. Ketidakmampuan perempuan untuk tampil memimpin merupakan bentuk subordinasi dari masalah tersebut, karena perilaku yang meminggirkan perempuan didasarkan pada anggapan terhadap perempuan itu emosional dan irasional. Proses subordinasi gender terjadi dalam berbagai bentuk dan proses pada waktu dan tempat yang berbeda. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga dan berbangsa.

Kita dapat melihat bahwa dalam UU Omnibus Law, kepentingan perempuan dikesampingkan, dan subordinasi dapat digunakan sebagai salah satu *focal point* untuk mengamati derajat diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam UU Omnibus Law. Pandangan lain yang dapat menimbulkan perbedaan gender yang tidak adil adalah status subordinat perempuan. Subordinasi perempuan berarti perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil

---

<sup>36</sup>Mansoer Fakhri, Analisis gender dan transformasi sosial, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008) hlm 13

keputusan, bahkan keputusan tentang dirinya sendiri. Wanita harus mematuhi keputusan pria. Menempatkan wanita di rumah merupakan bentuk subordinasi. Subordinasi sendiri yakni penilaian atau asumsi bahwa satu jenis kelamin memainkan peran yang lebih rendah daripada yang lain. Dibanyak masyarakat wanita dinilai terlalu lemah untuk memimpin satu kelompok masyarakat, ataupun memerintah suatu negara. Karena itulah perempuan dihambat bahkan dilarang masuk dalam lingkungan sosial dan politik masyarakat.<sup>37</sup>

### 3. *Strereotype* (Pelabelan)

Pelabelan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu biasa disebut dengan stereotip. Stereotip ini biasanya mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan. Bentuk lahir dari perspektif gender. Misalnya, masyarakat menganggap bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dan perempuan hanyalah pembantu, sehingga mereka dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan dan upah yang mereka peroleh.

### 4. *Violence* (Kekerasan)

Kekerasan atau *Violence* adalah serangan (*invasi*) atau serangan fisik atau mental seseorang yang ditujukan terhadap jenis kelamin tertentu (dalam hal ini berarti perempuan). Bentuk kekerasan seperti pemerkosaan, pemukulan hingga pelecehan seksual, penciptaan ketergantungan. Kekerasan berbasis gender secara inheren didorong oleh ketidaksetaraan sosial.

### 5. Beban kerja

Peran gender perempuan dalam masyarakat luas adalah mengatur pekerjaan rumah tanggasedemikian rupa sehingga banyak perempuan

---

<sup>37</sup> Yayuk Yuliati, Perubahan ekologis dan strategi adaptasi masyarakat diwilayah pegunungan tengger (suatu kajian gender dan lingkungan) (Univ Brawijaya press:2011) hlm 47

menanggung beban rumah tangga dua kali lipat dari laki-laki. Banyaknya pekerjaan yang diciptakan oleh bias gender dilihat masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, dan pekerjaan yang dianggap lebih penting lebih produktif ditujukan untuk pekerjaan laki-laki sehingga diklasifikasikan dalam statistik ekonomi negara. Perbedaan gender menghasilkan perbedaan gender, dan perbedaan gender menghasilkan berbagai ketidakadilan. Pemicu ketidaksetaraan gender adalah hasil dari bagaimana gender dikonstruksi secara sosial dan budaya. Ketidakadilan ini bermula dari kegagalan untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan atau laki-laki. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Ada beberapa definisi tentang keadilan dan kesetaraan gender yang diajukan oleh para penulis. Secara bahasa keadilan berasal dari adil (*just, fair, equitable, legal*) artinya berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam kamus bahasa Indonesia kata adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan berarti adil. Kesetaraan berasal dari kata setara (*matcahing, equal*) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang.<sup>38</sup>

Kesetaraan dan keadilan gender adalah keadaan dimana proporsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki adalah sama, serasi, seimbang, dan serasi. Keadaan ini dapat dicapai jika perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender tidak boleh didasarkan pada perhitungan matematis, bersifat universal, dan peka terhadap persoalan konteks dan situasi. Oleh karena itu, konsep kesetaraan merupakan konsep filosofis, kualitatif dan belum tentu

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Edisi ketiga), hal. 113

kuantitatif.<sup>39</sup> Keadilan gender mengarah pada kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki dengan memberi kesempatan untuk keadilan atau persamaan syarat dan status, dan menggunakan hak asasi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan masalah keamanan untuk menikmati hasil tersebut.

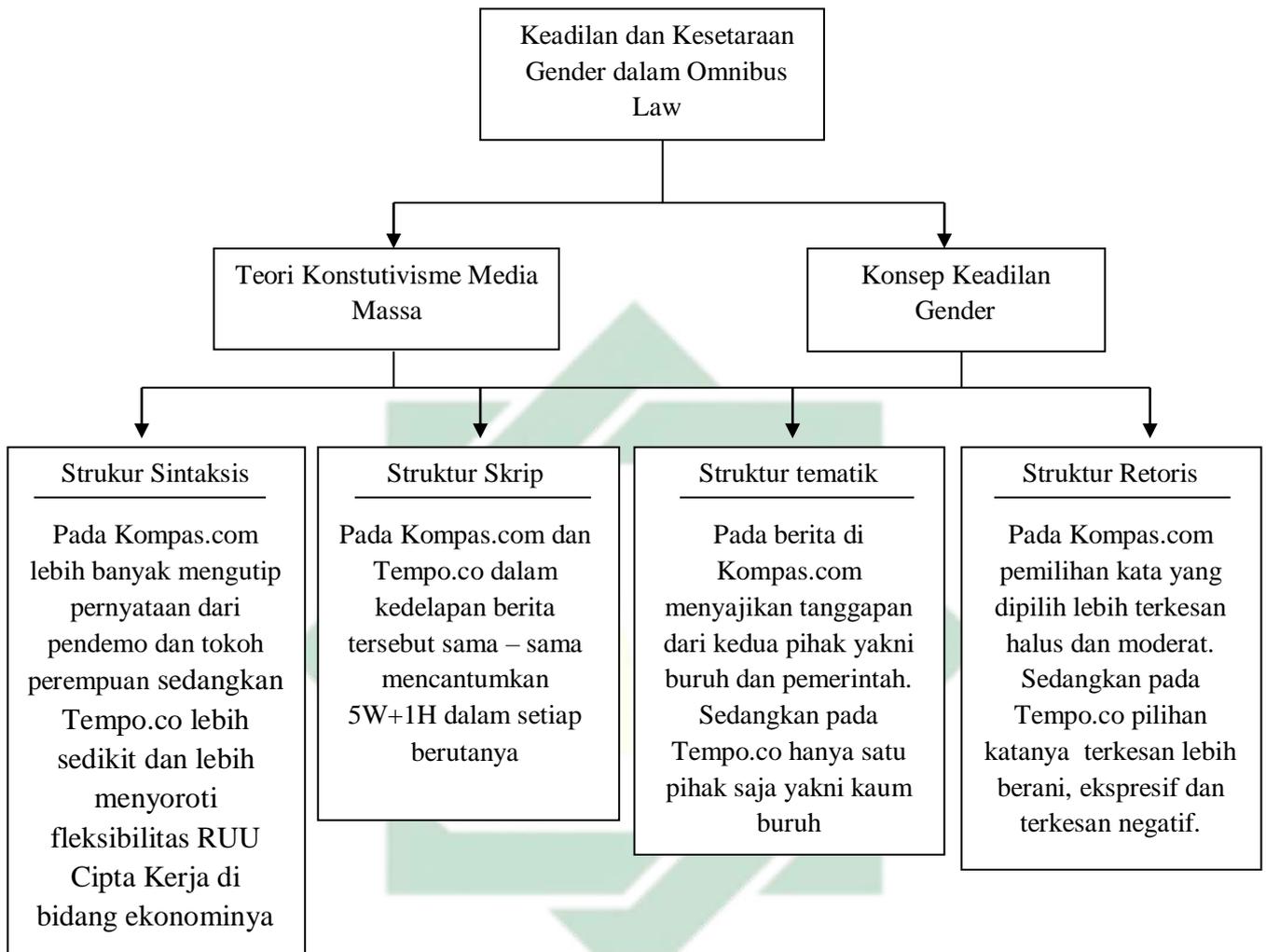
### **C. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini kerangka berpikir diperoleh berdasarkan fakta wacana RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini tidak luput dari liputan media memberitakan RUU Omnibus Law ini. Pendekatan konstruktivis memiliki dua fitur penting. Pertama, proses penekanan politik makna dan cara menghadapinya seseorang melukis kenyataan. Kedua, metode Konstruktivis memandang aktivitas komunikasi sebagai sebuah proses dinamis. Yang dimaksud adalah proses efektif yang digambarkan seseorang dalam sebuah pesan. Pendekatan konstruktivis melihat bagaimana isi pesan dibentuk oleh koresponden dan penerima, dan bagaimana individu membangun makna ketika menerima informasi. Pemberitraan tersebut dianalisa melalui analisis framing model Zhongdang Pan dan model Gerald M. Kosicki menggunakan sintaks, skrip, tema, dan struktur retorika untuk melihat bagaimana konstruksi berita gender dibentuk dalam Omnibus Law.

---

<sup>39</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan(KPP). 2004. Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA.

## Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan bagan diatas, penelitian didasari oleh adanya isu keadilan dan kesetaraan gender yang ada dalam Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan dilihat serta diamati dari dua media massa online yaitu Kompas.com dan Tempo.co untuk melihat bagaimana media membingkai sebuah berita yang akhirnya akan disajikan kepada khalayak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori konstruktivisme media massa dan Konsep keadilan gender, serta dalam pengamatannya digunakan metode analisis framing model Zhongdan Pan dan Gerald M.kosicki untuk menghasilkan gambaran dan analisis data.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur serta sumber tentang permasalahan penelitian. Literatur primer penelitian didapatkan dari pemberitaan Gender dalam Omnibus law Cipta kerja oleh Kompas.com dan Tempo.co yang berjumlah delapan berita edisi 8 Januari sampai 24 April 2020.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Singkatnya, penelitian kualitatif mempelajari informan sebagai subjek penelitian di lingkungannya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih bersifat kualitatif dan deskriptif. Artinya penelitian kualitatif memberikan gambaran yang rinci tentang situasi atau proses yang sedang diselidiki.<sup>40</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan cara observasi di media online yaitu Kompas.com dan Tempo.co dalam periode Januari hingga April 2020 dengan masing – masing empat berita dari portal berita tersebut.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

---

<sup>40</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta, Penerbit Erlangga, 2009), h. 24.

Subjek penelitian adalah siapa yang menjadi informan atau sumber informasi. Yang dimaksud informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi subjek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>41</sup> Untuk itu peneliti menentukan Kompas.com dan Tempo.co sebagai objek dalam penelitian. Peneliti menggunakan 8 berita dari Kompas.com dan Tempo.co. Masing-masing 4 berita sebagai subjek dalam penelitian. Alasan peneliti memilih 8 berita tersebut karena 8 berita tersebut sama – sama membahas mengenai gender dalam omnibus law cipta kerja, serta rentan waktu berita dari kedua portal tersebut yakni pada Januari hingga April yang banyak membahas mengenai gender dalam omnibus law dengan waktu yang tidak terlampau jauh.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus masalah yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah berita terkait gender dalam pembahasan Omnibus Law. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan sintaks, skrip, tema, dan struktur retorika.

## D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data utama atau informasi primer dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain.

Sumber data untuk penelitian ini adalah:

---

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Budaya*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 76

### 1. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita terkait masalah yang diangkat oleh peneliti yakni Gender dalam Omnibus Law Cipta Kerja dan juga sumber utama informasi yang didapatkan yaitu dari Kompas.com dan Tempo.co.

### 2. Sumber sekunder

Sumber informasi sekunder penelitian ini adalah catatan dan informasi dari literature buku serta bacaan yang terkait dengan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Analisis isi framing**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dokumen sebagai alat untuk mengumpulkan data observasi. Analisis dokumen adalah salah satu alat pada teknik observasi. Oleh karena itu, analisis framing berupaya menganalisis teks berita dari media online Kompas.com dan Tempo.co secara komprehensif terkait pemberitaan gender pada pembahasan Omnibus Cipta kerja.

Penelitian ini menggunakan langkah analisis framing menggunakan model Zhondang Pan dan model Kosicki. Dalam penelitian ini, empat struktur teks pesan digunakan sebagai alat kerangka kerja: sintaks, deskripsi, subjek, dan retorika. Keempat dimensi tersebut membentuk semacam tema yang menyatukan unsur-unsur semantik berita dalam konteks global. Model ini mengasumsikan bahwa semua pesan memiliki kerangka kerja yang berperan sebagai tempat sentral untuk mengorganisasikan ide-ide. Bingkai adalah ide yang diasosiasikan dengan elemen berbeda dari isi pesan, menambahkan kredit, informasi latar belakang, dan

penggunaan kata dan frasa tertentu di seluruh teks. Bingkai dikaitkan dengan makna. Sehingga dapat mengetahui bagaimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa dengan melihat rangkaian karakter yang muncul dalam teks.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan arsip data tertulis atau dimuat oleh Kompas.com dan Tempo.co yang berisikan mengenai pemberitaan gender dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mengaturnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, serta bagaimana menceritakan data tersebut kepada orang lain.<sup>42</sup>

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis framing. Hal ini dapat dengan mudah digambarkan sebagai analisis untuk mengkaji bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, dll) dibingkai oleh media. Pembingkai realita sosial dengan konstruksi, makna dan pengertian tertentu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing dengan menggunakan pendekatan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan dan Kosicki, framing didefinisikan sebagai proses menempatkan lebih banyak informasi dari pada yang lain untuk menekankan isi pesan dan membantu pembaca untuk lebih fokus pada pesan tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 248

<sup>43</sup> Eriyanto, *Op.Cit*,Hlm.252.

Dalam penelitian ini, menggunakan konsep analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada konstituennya: sintaksis, skrip, tema, dan level retorika. Kerangka konseptual Pan dan Kosicki secara luas menggambarkan bagaimana jurnalis menyusun dan menafsirkan peristiwa. Empat teknik perangkat framing didefinisikan sebagai berikut:

1. Struktur Sintaksis, yaitu bagaimana wartawan mengorganisasikan fakta dan peristiwa yang mereka laporkan. Perangkat framenya adalah skema berita, dan entitas yang diamati adalah berita utama, petunjuk, informasi latar belakang, sumber, penjelasan, dan kesimpulan.
2. Struktur Skrip, yaitu elemen integritas pesan dan dapat menjadi framing yang penting. Bentuk umum dari struktur ini adalah pola 5W 1H. (who, what, when, where, why, dan how).
3. Struktur Tematik, yaitu bagaimana peristiwa itu diterbitkan atau diproduksi oleh wartawan. Alat observasi untuk konsistensi, detail, bentuk, kalimat, dan kata ganti.
4. Struktur Retoris, yaitu menggambarkan pilihan kata yang dipilih wartawan untuk menekankan makna yang ingin mereka tekankan. Ada beberapa elemen yang digunakan jurnalis dalam struktur retorika mereka. Misalnya kamus, pilihan, arti kata tertentu, dan sebagainya. Selain itu, pesan berita dapat ditekankan dengan menggunakan foto dan elemen grafis.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah Kompas.com**

Kompas.com ialah salah satu pionir media online di Indonesia ketika pertama kali hadir di internet pada 14 september 1995 dengan nama Kompas Online. Kompas online pada awalnya hanya berfungsi sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Melihat besarnya potensi dunia digital, Kompas Online Dikembangkan menjadi unit bisnis mandiri di bawah PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak itu, Kompas Online lebih dikenal dengan KCM. Di zaman sekarang ini, pengunjung KCM Tidak lagi hanya mendapatkan harian Kompas, tetapi juga dapat diperbarui dengan kejadian berita terbaru setiap harinya. Pengunjung KCM meningkat pesat seiring pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Dapatkan informasi dari internet sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. bahkan dunia digital terus berubah. KCM juga berbenah diri.<sup>44</sup>

Seiring waktu, 2008 melihat perubahan besar dari Kompas.com. Dengan ide ini-Reborn, Kompas.com menghadirkan layout, logo, dan konsep baru, ramah pengguna dan ramah pengiklan. Sinergi ini membuat Kompas.com menjadi sumber berita yang lengkap sebab tersedia juga dalam bentuk gambar, video, dan live streaming. Hal ini tentunya merupakan perubahan yang signifikan bagi

---

<sup>44</sup><https://inside.kompas.com/about-us>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 21:43

pengunjung Kompas.com di awal tahun 2008 mencapai 20 juta pembaca aktif bulanan dan total 40 juta tampilan halaman bulanan. Saat ini, Kompas.com memiliki 120 juta tampilan halaman per bulan. Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan di channel atau kanal di halaman depan Kompas.com kanal ini didesain sesuai dengan tema berita dan membuat setiap pengelompokkan berita memiliki karakter. Kanal – kanal tersebut antara lain :

a. Kompas Female

Memuat informasi seputar dunia wanita; tips – tips seputar karier, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja.

b. Kompas Bola

Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola

c. Kompas Health

Berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.

d. Kompas Tekno

Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review produk dan beragam berita teknologi.

e. Kompas Entertainment

Menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri.

f. Kompas Otomotif

Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, trend mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan.

g. Kompas Properti

Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal.

h. Kompas Image

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto Kompas.com

i. Kompas Karier

Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai one-stop career solution bagi para pencari kerja maupun karyawan.

## 2. Perbedaan Kompas.com dan Kompas.id

### *Kompas.com*



Kompas.com merupakan situs portal berita online yang dimiliki oleh Kompas. Kompas.com dikelola oleh PT Kompas Cyber Media.

*Kompas.id*



Sedangkan kompas.id merupakan portal yang menyajikan berita yang terbit di harian Kompas yang dialihkan ke dalam platform digital. Kompas.id dikelola oleh PT. Kompas Media Nusantara yang juga sebagai penerbit harian Kompas.<sup>45</sup>

Bedanya kompas.com dengan kompas.id adalah kompas.com menyediakan informasi yang lebih terkini dan terupdate sedangkan kompas.id menyediakan informasi yang sesuai dengan harian Kompas.com

### **3. Visi & Misi Perusahaan**

Metode Verifikasi Kompas, dengan slogan Jernih Melihat Dunia, Kompas.com ingin menempatkan diri sebagai media yang selalu hadir Informasi yang objektif, lengkap, independen, dan tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan. Oleh karena itu, Kompas.com tidak hanya menyajikan informasi terkini Bentuk berita keras diperbarui sesuai dengan sifat media Online, Anda juga dapat menjelaskan seluruh berita dari semua sudut lokasi kasus adalah masalah yang sering membingungkan. Liputan penuh disajikan dalam berbagai format, termasuk hardnews, berita/fitur ringan, ringkasan berbagai isu yang diangkat setiap pagi, laporan memberikan update informasi lengkap dari waktu ke waktu, hingga laporan panjang dan mendalam. Cakupan mendalam atau

---

<sup>45</sup><https://kb.kompas.id/baca/produk/apa-bedanya-dengan-kompas-com/>, diakses pada 20 Januari pukul 22:34

mendalam disajikan dalam bentuk multimedia storytelling yang disebut visual Kompas Interakti (VIK) (vik.kompas.com). Media online yang di haruskan memberikan berita secara cepat. Namun, bagi Kompas.com kecepatan itu bukanlah segalanya karena ada pepatah jurnalistiik lama yang masih dipegang teguh oleh Kompas.com yakni *Get it first, but first get it right.*<sup>46</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Kompas.com

##### Tim Manajemen Digital

<b>Direktur</b>	: Andy Budiman
<b>Manajer Umum Penjualan</b>	: Devie Emza
<b>Manajer Umum Pemasaran</b>	: Dian Gemiano
<b>Manajer Umum SDM</b>	: M. Trinovita
<b>Manajer Video</b>	: Jerry Eddie Nurcahyo Hadiprojo

##### Divisi Iklan Digital

<b>Asisten Manajer Penjualan</b>	: Andrew H. Sinaga Yulveni Setiadi
----------------------------------	---------------------------------------

##### Divisi Teknologi

<b>Manajer Teknologi</b>	: Ihwan Santoso
<b>Asisten Manajer Teknologi</b>	: Murfi Abbas Hatumena Yohanes Kartiko Pambudi MH Prio Agung Wibowo

---

<sup>46</sup> <https://inside.kompas.com/>, diakses pada 21 Januari pukul 08:01

## **Staf Direktur**

**Penasihat Bisnis Media Digital** : Eberhard Nove Ojong

**Spesialis Manajemen Produk** : Romi Dandiawan

**Sekretaris Direktur dan Manajer Umum** : Anastasia Angeline K

## **Kompasiana**

**Manajer Kompasiana** : Iskandar Zulkarnaen

**Manajer Penjualan Kompasiana** : V. Roro Sekar Wening

**Departemen Editorial** : Wisnu Nugroho

**Penanggung Jawab** : Agustinus,  
Wisnubrata,  
J.Heru Margianto

**Asisten Editor Manajemen Berita** : Amir Sodikin

**Asisten Manajemen Editor** : Moh. Latip

: Aris Fertony

**Asisten Manajemen Editor Otomania.com** : Harvenda

**Editor Penanggung Jawab Juara.net** : Weshley Hutagalung

**Editor Manajemen Juara.net** : Firzie A. Idris

**Asisten Editor Manajemen Juara.net** : Jalu Wisnu Wirajati

**Editor:** Laksono Hari Wiwoho, Fidel Ali Permana,  
Glori Kyrious Wadrianto, Farid Assifa,  
Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Ana  
Shofiana Syatiri, Kistyarini, Palupi Annisa

Auliani, Egidius Patnistik, Ervan Hardoko,  
Pipit Puspita Rini, Erlangga Djumena,  
Bambang Priyo Jatmiko, Muhammad Reza  
Wahyudi, Taslimah Widiанти Kamil, Lusia  
Kus Anna Maryati, Deasy Syafrina, I Made  
Asdhiana, Hilda Hastuti, Jodhi Yudono, Fikria  
Hidayat, Ni Luh Made Pertiwi Finlandiari,  
Bestari, Azwar Ferdian, Agung Kurniawan,  
Sandro Gatra Sinaga, Oik Yusuf Araya, Icha  
Rastika, Sabrina Asril, Irfan Maullana, J.  
Primus, Yunanto Wiji Utomo, Aloysius  
Gonsaga Angi Ebo, Aprilia Ika, M. Fajar  
Marta, Pascal S. Bin Saju, Indra Akuntono,  
Deliusno, Aprilia Ika Warsanti

**Reporter:**

Fabian Januarius Kuwado, Robertus  
Belarminus Goo, Antonius Tjahjo Sasongko,  
Ferril Dennys Sitorus, Donny Apriliananda,  
Febri Ardani Saragih, Dian Maharani, Reska  
Koko Nistanto, Kurnia Sari Azizah,  
Alsadadrudi, Ihsanuddin, Dani Prabowo,  
Sakina Rakhma Diah Setiawan, Estu  
Suryowati, Andri Donnal Putera, Yoga  
Sukmana, Abba Gabrillin, Ambaranie Nadia

Kemala, Wahyu Adityo Prodjo, Jessi Carina,  
Silvita Agmasari, Kahfi Dirga Cahya, Andi  
Muttya Keteng Pangerang, Tri Susanto  
Setiawan, Arimbi Ramadhiani, Nabilla  
Tashandra, Anju Christian, Nugyasa  
Laksamana, Ade Jayadiredja, Wisnu Nova,  
Verdi Hendrawan, Fatimah Kartini Bohang,  
Yoga Hastyadi Widiartanto, Ridwan Aji  
Pitoko, Stanley Ravel, Ghulam M. Nayazri,  
David Oliver Purba, Sri Anindiati Nursatri,  
Dian Reinis Kumampung, Pramdia Arhando,  
Iwan Supriyatna, Rakhmat Nur Hakim, Fachri  
Fachrudin

**Editor Foto & Fotografer :** Dino Oktaviano Sami Putra, Heribertus  
Kristianto Purnomo, Roderick Adrian Mozes,  
Ari Prasetyo

**Penyunting Bahasa :** Erwin Kusuma Oloan Hutapea, Dimas Wahyu  
Trihardjanto, Eris Eka Jaya

**Sekretaris dan Administrasi :** Tania Frederika Titaley, Ira Fauziah, Adinda  
Dwi Putri

**Alamat Redaksi :** PT. Kompas Cyber Media Gedung Kompas  
Gramedia Unit II Lt. 5. Jl. Palmerah Selatan  
No. 22 - 28 Jakarta 10270, Indonesia. Telp:

(021) 5350377/53699200 Fax: (021) 5360678

Email Redaksi: [redaksikcm@kompas.co.id](mailto:redaksikcm@kompas.co.id)

[redaksikcm@kompas.com](mailto:redaksikcm@kompas.com) Kontak Iklan:

[iklankcm@kompas.com](mailto:iklankcm@kompas.com)

## 5. Alur Pemberitaan Kompas.com

Jaman sekarang di era digital dan media sosial ini, kebenaran sulit dipahami ditengah lautan informasi, menemukan kebenaran menjadi sangat penting. Kompas.com tidak ingin menjadi bagian dari kerusuhan media sosial. Kompas.com mencoba memberikan jawaban atas kerusuhan tersebut. Selain ratusan wartawan di seluruh Indonesia yang menyiapkan berita berdasarkan informasi di lapangan, Kompas.com juga memiliki departemen media sosial yang selalu memantau percakapan media sosial langsung. Hasil kerja tim media sosial Mendengarkan Media Sosial dikirim ke tim redaksi, yang kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk diproses di dapur ruang redaksi. Redaksi tidak langsung menelan apa yang dibahas di media sosial. Tim Kompas.com terbiasa menyaring informasi, baik itu informasi di tempat atau informasi media sosial, apakah itu benar atau tidak benar.

Untuk mendapatkan kebenaran dari jurnalistiknya kompas.com secara rutin melakukan observasi narasumber, lapangan dan data. Pengamatan lapangan adalah prioritas utama yang dilakukan untuk mendapatkan fakta orisinal, karena semua informasi awal yang didapatkan termasuk dari media sosial semua dicek langsung ke lapangan. Selanjutnya kompas.com mendalami fakta dengan mencari narasumber yang terpercaya dengan mencari sumber pertama yang berada saat

peristiwa terjadi. Informasi dari sumber kedua juga diperlukan hanya saja sifatnya skeptis atau ragu. Semua informasi dari narasumber tersebut wajib dicek ulang ke pihak – pihak yang terkait. Latar belakang, rekam jejak dan kredibilitasnya juga menjadi perhatian utama demi mendapatkan pandangan yang obyektif dari mereka.

Kompas.com memiliki lembaga riset mandiri yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan (*Litbang*) Kompas yang selama puluhan tahun teruji dengan data yang obyektif, valid, dan independen. Kompas.com merupakan media online terpercaya dan salah satu yang terbesar di Indonesia.

Kompas.com telah terdaftar secara resmi di bawah Dewan Pers. Karya jurnalistik Kompas.com telah diakui dan sering mendapatkan berbagai penghargaan tingkat dunia maupun nasional. Kompas.com didanai dari pendapatan atau bisnis PT Kompas Cyber Media. PT Kompas Cyber Media adalah perusahaan di bawah grup Kompas Gramedia yang didirikan Jakob Oetama dan PK Ojong. Sebagai media online yang mewarisi jurnalisme presisi dan jurnalisme makna yang diusung Jakob Oetama, Kompas.com mengedepankan akurasi dan independensi dalam setiap artikelnya. Kompas.com tak terkait dengan partai politik, non-partisan, menghargai perbedaan dan keragaman, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>47</sup>

## 6. Sejarah Tempo.co

Pada tahun 1969, di Jakarta, seorang pemuda bermimpi memiliki majalah mingguan. Setelah mendedikasikan keberadaan majalah mingguan, terbitlah majalah bernama Ekspres. Beberapa abdi dalem berusaha untuk menerbitkan

---

<sup>47</sup> Ibid

majalah, antara lain: Goenawan Muhammad, Fikri Jufri, Christianto Wibisono dan Usamah. Akan tetapi, timbul perbedaan pendapat dan prinsip antara pemilik modal dengan jajarannya, dan isu-isu yang berujung pada perpecahan yang berujung pada mundurnya Goenawan cs dari jajaran mingguan pada tahun 1970. Di Jakarta juga ada majalah Djaja yang dikelola Hardjoko Trisnadi yang produksi penerbitannya terhenti. Dalam hal ini, karyawan majalah Djaja akan berinisiatif mengirimkan surat kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta yang diketuai Ali Sadikin, meminta privatisasi majalah Djaja yang akan dikelola oleh Yayasan Jaya Raya DKI Jakarta yang terafiliasi. Selain itu, pengurus Yayasan Jaya Raya juga sebagian besar adalah mantan pengurus majalah Express. Maka terjadilah negosiasi antara Djaja dengan mantan anggota Ekspres saat itu untuk mendirikan Majalah Tempo di bawah PT. Graffiti Press sebagai penerbit.

Nama Tempo dipilih karena mudahnya kata itu diucapkan dan diingat. Dan majalah ini diluncurkan pada 6 Maret 1971, ketika Tempo datang dengan cara pemberitaan yang berbeda yang diterima publik. Dicitrakan dengan mengutamakan jurnalisme dan tulisan yang objektif dan jujur, disajikan dalam bentuk prosa yang menarik dan jenaka.

Majalah Tempo sempat dibredel pada masa Orde Baru pada 1982, justru karena terlalu keras terhadap pemerintah saat itu. Namun karena negosiasi pada saat itu dan kesepakatan yang ditandatangani dengan pemerintah, majalah tersebut memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Di era pasca Orde Baru, para pekerja di bawah payung Trimble saat itu mulai bubar, hingga akhirnya berkumpul kembali untuk membahas apakah Majalah Trimble akan dilanjutkan atau bahkan

dibubarkan. Pada akhirnya, Trimble memutuskan untuk melanjutkan penerbitan, tetapi saat itu Trimble beralih untuk meningkatkan majalah ke outlet nasional. Maka pada tahun 2001, PT. Arsyia Raya Perdana go public dengan mengubah namanya menjadi PT. Tempo Inti Media Tbk sebagai penerbit majalah Tempo.

Awalnya, portal berita Tempo bernama Tempo Interaktif (Tempo interaktif.com). Sejak tahun 1995, Tempo Interactive muncul sebagai pionir awal liputan media online, sebagai media yang memenuhi kebutuhan informasi publik yang terpercaya. Selama tahun 2008, 2009, 2010, Tempo Interaktif mengalami beberapa perbaikan, dan Tempo Interaktif yang tercatat pada tahun 2008 tampil dengan wajah baru. Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah berita di Tempo Interaktif meningkat. Rata-rata berita pada saat itu adalah 300. Dengan tren penggunaan smartphone yang semakin meningkat, Tempo Interactive juga mengembangkan aplikasi yang dapat diakses melalui seluler. Jumlah pengunjung Tempo Interactive meningkat pesat lebih dari 500% dari perangkat seluler. Pada kuartal terakhir 2011, manajemen Tempo sepakat mengganti nama TempoInteraktif.com menjadi Tempo.co. Langkah transformatif ini merupakan bagian dari komitmen Tempo untuk meningkatkan kualitas produk dan pemberitaannya. lebih dari itu langkah ini juga bisa disebut sebagai langkah serius dari Tempo untuk mengembangkan produk pada Media Online.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Korporat.Tempo.co. <https://korporat.tempoco.co/tentang/sejarah>, diakses tanggal 22 Januari 2022 pukul 21.00

# TEMPO.CO

( logo Tempo.co)

## 7. Visi & Misi Tempo.co

### a) VISI

Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berfikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.

### b) MISI

- 1) Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda – beda.
- 2) Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.
- 3) Tempat kerja yang sehat serta mensejahterahkan dan mencerminkan keragaman budaya Indonesia
- 4) Proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan

- 5) Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui pengingkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
- 6) Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.<sup>49</sup>

## 8. Struktur Organisasi Tempo.co

- **Direktur Utama** : Wahyu Dhyatmika
- Direktur** : Burhan Sholihin,  
Y. Tomi Aryanto
- **Pemimpin Redaksi** : Anton Aprianto
- Redaktur Eksekutif** : Anton Septian
- Koordinator Kanal Vertikal** : Anton Septian
- **Nasional Dan Hukum**
- Kepala** : Syailendra Persada
- Redaktur** : Amirullah, Eko Ari Wibowo
- Staf Redaksi** : Aditya Budiman, Dewi Nurita, Egy  
Adyatama, Friski Riana, M. Rosseno Aji Nugroho, Kukuh S
- **Ekonomi Dan Bisnis**
- Kepala** : Rr Ariyani Y Widyastuti
- Redaktur** : Kodrat Setiawan, Martha Warta Silaban
- Staf Redaksi** : Ali Ahmad Noor Hidayat, Caesar Akbar, Fajar

---

<sup>49</sup> Ibid.

Febrianto, Francisca Christy Rosana

**Reporter** : Muhammad Hendratyo Hanggi

**Metro**

**Kepala** : Juli Hantoro

**Redaktur** : Tjandra Dewi

**Staf Redaksi** : Ahmad Faiz, Iqbal Muhtarom, M Julnis Firmansyah,  
Lani Diana

○ **Internasional**

**Kepala** : Dewi Rina Cahyani

**Staf Redaksi** : Yudono Yanuar, Suci Sekarwati, Sita Planasari

○ **Gaya Hidup**

**Kepala** : Rini Kustiani

**Redaktur** : Istiqomatul Hayati, Mitra Tarigan

**Staf Redaktur** : Cheta Nilawaty, Ecka Wahyu Pramita, Mila Novita,  
Marvela, Ninis Chairunnisa, Silvy Riana Putri, Yayuk  
Widyarti, Yunia Pratiwi

**Sains, Sport Dan Otomotif**

**Kepala** : Nurdin Saleh

**Redaktur** : Rina Widiastuti, Jobpie Sugiharto, Wawan Priyanto,  
Zacharias Wuragil

**Staf redaksi** : Arkhelaus Wisnu Triyogo, Devy Ernis, Dicky

Kurniawan, Erwin Z. Prima, Febriyan, Maria Francisca

Lahur, Rafif Rahedian

○ **Kanal Magang**

**Kepala** : S. Dian Andryanto

**Staf Redaksi** : Dwi Arjanto, Endri Kurnia wati, Nurhadi, Bram  
Setiawan

○ **Multimedia**

**Kepala** : Nana Riskhi Susanti

**Fotografer** : Amston Probel (Koordinator), Hilman Fathurrahman,  
Imam Sukamto, Muhamad Hidayat, M. Taufan  
Rengganis, Subekti Kasdan, Tony Hartawan

**Periset** : Charisma Adristy (Koordinator), Fardi Bestari, Fajar

**Foto** : Januarta, Nufus Nita  
Dheayu Jihan, Harfin Ryan Maulana, Ridian Eka

**Produser Video** : Saputra, Zulfikar Epriyadi

Muhamad Iqbal (Koordinator), Aditya Sista Putra, Aji

**Reporter video** : Ridwan Mas, Tiffani Angelica.

**Podcast**

**Produser** : Dewa Made Erdy Kusuma

**Asisten Produksi** : Rosha Nur Shaula

○ **Medialab**

**Kepala** : Moerat Sitompul

**Interaktif** : Inge Klara Safitri Krisna Adhi Pradipta, Sunardi

**Data** : Faisal Javier

**Desain Majalah Digital** : Imam Riyadi, Rio Ari Seno, Ryan R. Akbar

**Cek Fakta** : Budhy Nurgianto, Ika Ningtyas, Zainal

**Programer** : Ali Umar, Melvian Danuwijaya

○ **Pengembangan Audiens**

**Kepala Bagian Optimasi Digital** : Fadhli Sofyan

**Analisis data** : Rahmawati

**Media social** : Abdur Rohim Latada, Andra Irfian

**Desain Kreatif** : Lubis, Noviyanti Putri, Rommy

**SEO** : Roosyana

Errizqi Dwi Cahyo, Muhamad Farel

Fausta, Zakiyah Rachmalia

: Andika Dwi, Tika Azaria

**Teras.Id**

**Redaktur Pelaksana** : Yosep Suprayogi

○ **Indonesiana**

**Penanggung Jawab** : Anton Septian

**Staf Redaksi** : Tulus Wijanarko

○ **Teknologi Informasi**

**Kepala** : Handy Dharmawan

**Koordinator** : William Rince

**Programer** : Birtha Arifudzaki, Abdul Rozaq Tri Novanto,

Riky Susanto, Arif Hidayat, Reza Pahlevi

**Web Desainer** : Sunardi

o **Tempo.Co English**

**Kepala** : Purwani Diyah Prabandari

**Editor** : Laila Afifa, Petir Garda, Bhwana

**Penerjemah** : Dewi Elvia Muthiariny, Ricky M. Nugraha.<sup>50</sup>

## 9. Alur pemberitaan Tempo.co

Dalam liputan berita masa-masa awal berdirinya Tempo, artikel-artikel yang berkaitan dengan ide dan tujuan media massa dibangun. Isu-isu yang dibahas dalam pemberitaan tersebut berkaitan dengan isu-isu sosial yang berdimensi politik, ekonomi, budaya serta filosofis. Informasi yang dikeluarkan Trimble cenderung beragam, mencakup semua aspek masyarakat.

Gunawan Muhammad selaku salah satu pendiri Tempo menyatakan, wartawan Tempo diharuskan mendapatkan informasi yang lebih banyak dari narasumber yang lebih beragam. Ini yang menjadikan mereka merasa berada di media dengan standar jurnalistik yang lebih tinggi dibandingkan media lain. Gunawan menyebutkan, tugas wartawan Tempo adalah mencari kebenaran. Tempo tidak menganggap yang paling benar. Karenanya, mencari kebenaran adalah sebuah kewajiban. Dalam kultur Tempo, tugas reporter adalah mengumpulkan data. Angle setiap berita ditentukan oleh penulis yang membuat penugasan dan menulis berita. Tugas reporter adalah pergi ke lapangan,

---

<sup>50</sup><https://www.tempo.co/about>, Diakses pada 22 januari 2022 pukul 21:05

mewawancarai sumber dan menyerahkan transkrip wawancara beserta background reportase kepada para penulis. Pos liputan para reporter juga dirotasi secara berkala agar mereka menguasai pelbagai bidang. Kepala Tempo biro Jakarta mengatakan ini model Tempo yang tak dimiliki media lain.<sup>51</sup>

Tempo melatih wartawannya untuk mencari angle baru yang berbeda dengan media lain. Wartawan baru diajari untuk belajar dan menonton berita yang berbeda setiap saat, tetapi tidak pernah meniru sudut pandang yang digunakan. Ketika wartawan Tempo melakukan wawancara tanpa persiapan, mereka dianggap memalukan. Karenanya reporter harus riset, membaca majalah, dan klip koran di perpustakaan terlebih dahulu. Dalam pemberitaannya Tempo sering menggunakan gaya pemberitaan secara kronologis. Namun selain gaya penuturan kronologis, Tempo juga menggunakan cara bertutur secara naratif dengan mengajukan pertanyaan retorikal dan struktur kalimat pasif. Struktur kalimat pasif digunakan Tempo agar subjek dari kalimat itu tak muncul. Ada alasan politik dibelakang penggunaan kalimat pasif. Jika sebuah kalimat tidak punya subjek, tak seorang pun dapat dimintai tanggung jawab.

---

<sup>51</sup> Steele, Janet. Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru. (Jakarta: Dian Raykat, 2007), hlm 10-15

## G. Analisis Data

Framing tidak hanya berkaitan dengan skema individu (wartawan), tetapi juga dengan proses produksi berita, dan dengan kerangka kerja dan rutinitas organisasi media. Bagaimana suatu peristiwa distrukturkan, mengapa dipahami dalam satu bingkai, dalam bingkai lain, dan tidak dalam bingkai lain, tidak hanya bergantung pada sudut pandang jurnalis, tetapi juga pada kebiasaan kerja dan makna media lembaga yang secara langsung mempengaruhi peristiwa.

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yaitu salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai. Pan dan Kosicki mendefinisikan framing sebagai strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan berita.<sup>52</sup>

Model ini mengasumsikan bahwa setiap berita memiliki kerangka sentral yang mengorganisasikan ide-ide. Frame adalah gagasan untuk menggabungkan berbagai elemen tubuh berita (kutipan sumber, informasi latar belakang, penggunaan kata atau frasa tertentu, dll.) ke dalam keseluruhan isi pesan. Bingkai dikaitkan dengan makna. Karakter dalam teks memberitahu kita bagaimana menafsirkan suatu peristiwa. Unsur-unsur yang merepresentasikan pemahaman seseorang memiliki bentuk aturan penulisan yang terstruktur melalui makna tersirat dari berita tersebut.

Dalam analisis framing terdapat empat unsur utama, yaitu: Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing media. Kecenderungan wartawan untuk memahami suatu

---

<sup>52</sup> Alex Sobur, Analisis Teks Media, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm 163.

peristiwa dapat dilihat dalam empat struktur tersebut. Sehingga dapat mengetahui bagaimana jurnalis menyusun, dan menceritakan peristiwa, kalimat apa yang digunakan dan kata serta idiom yang dipilih. Ketika menulis berita dan menyoroti pentingnya peristiwa, jurnalis menggunakan semua strategi wacana ini untuk meyakinkan pembaca bahwa berita yang mereka tulis itu benar. Pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Bagan 4.1 Tabel Pendekatan Analisis Zhongdang Pan da Gerald M. Kosicki**

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
<b>SINTAKSIS</b> (Cara wartawan menyusun fakta)	Skema Berita	Headline, Lead, Latar informasi, Kutipan, Sumber, Pertanyaan, Penutup.
<b>SKRIP</b> (Cara wartawan mengisahkan fakta)	Kelengkapan Berita	5W + 1H
<b>TEMATIK</b> (Cara wartawan menulis fakta)	Detail Koherensi Bentuk kalimat Kata Ganti	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat.
<b>RETORIS</b> (Cara wartawan menekankan fakta)	Leksikon Grafis Metafora	Kata,Idiom, Gambar/foto, Grafik.

Janji pemerintah yang hendak membuktikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mendukung pemberdayaan perempuan adalah omong kosong ketika menghadapi kenyataan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang cenderung mengabaikan hak-hak rakyatnya. Sebelum UU Cipta kerja, perempuan rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi tempat kerja.

Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur pemutusan hubungan kerja oleh suatu perusahaan dan diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tata tertib dalam melakukan pemberhentian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut mengatur bahwa pemecatan sepihak tidak diperbolehkan dan harus dirundingkan terlebih dahulu. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau pekerja tidak terampil hanya setelah badan arbitrase perusahaan telah dibentuk. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 151(3) UU Ketenagakerjaan.

Di sisi lain Omnibus Law memberi dampak kerugian kepada pekerja perempuan yakni terkait cuti haid, dalam RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa (1) Pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit pada waktu haid dan memberitahukan kepada pengusaha tidak dipaksa bekerja pada hari pertama dan kedua haid. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kasus ini tidak menyebutkan hak cuti haid bagi karyawan perempuan, dan pelaksanaan dan regulasinya tergantung pada peraturan perusahaan, dan karyawan wanita berada pada posisi yang lemah dalam hal aturan cuti haid. Adapun ketentuan lain mengenai cuti hamil dan mekanisme cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, dan bila perlu memberikan kesempatan kepada pekerja perempuan untuk menyusui anaknya selama jam kerja. Kedua pasal tersebut tidak mencakup pembahasan, perubahan, dan penghapusan status.

Karena hal tersebutlah banyak pekerja khususnya kaum perempuan yang turun kejalan guna memperjuangkan hak mereka, banyak aktifis perempuan juga ikut andil memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah direnggut oleh UU ketenagakerjaan ini. Berikut ini adalah beberapa berita yang memuat mengenai perempuan dalam Omnibus law cipta kerja :

### 1. Analisis Framing Berita Kompas.com

#### BERITA I

Judul : “*Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Buruh Perempuan.*”<sup>53</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Head	Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Buruh Perempuan
	Lead	Koalisi buruh perempuan meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
	Latar Informasi	Dalam rangka memperingati hari kartini yang dirayakan setiap 21 april. Jumisih selaku perwakilan koalisi buruh yang juga ketua umum federasi buruh lintas pabrik, meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta kerja.
	Kutipan Sumber	Jumisih : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera hentikan pembahasan Omnibus law RUU cipta kerja, karena berpotensi merugikan buruh perempuan.</li> <li>• Berikan kemudahan bagi buruh perempuan untuk <i>sosial distance</i> dengan penerapan PSBB tanpa diskriminasi dengan jaminan upah penuh.</li> <li>• Fokuskan kinerja pemerintah untuk penanganan Covid-19, jangan biarkan korban terus berjatuhan.</li> </ul>

<sup>53</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/17422231/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-berpotensi-merugikan-buruh-perempuan?page=all>

	Penutup	Pada tuntutan tersebut pemerintah meresponnya dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Panja (Panitia Kerja) Omnibus law.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Kaum perempuan yang diwakili oleh Jumisih menyuarakan bahwa Omnibus law sangat merugikan kaum perempuan.
	<i>Where</i>	Jakarta, Sekitaran bundaran patung kuda
	<i>When</i>	Selasa, 21 April 2020.
	<i>Who</i>	Jumisih dan Rieke diah pitaloka
	<i>Why</i>	Karena, hak – hak yang seharusnya didapatkan buruh perempuan dan juga pemberian upah yang sesuai tidak didapati dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini .
	<i>How</i>	Diketahui bahwa, dalam rangka memperingati hari kartini koalisi buruh perempuan menggelar aksi yang bertujuan untuk meminta DPR dan juga Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law. Kedua, aksi ini digelar karena dianggap akan berpotensi merugikan buruh perempuan karena kebijakan – kebijakan barunya. Ketiga, Panitia kerja pembahasan Omnibus law RUU cipta kerja mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap RUU cipta kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Artikel ini secara tematik menekankan pernyataan dari Jumisih mengenai akibat yang terjadi apabila RUU Omnibus Law cipta kerja disahkan dan menyebabkan kerugian untuk para buruh khususnya perempuan. Serta Panja (Panitia Kerja) Omnibus law yang mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat.
	Kata, Idiom,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kata “Koalisi”bermakna terjalin kerja</li> </ul>

Struktur Retoris	Gambar/fisik	<p>sama antara buruh perempuan dan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)., Kata “Federasi” memiliki arti perjanjian, Kata “social distancing” artinya jarak sosial atau pembatasan sosial , Kata ”diskriminasi” artinya sikap membeda – bedakan secara sengaja terhadap suatu golongan tertentu dan juga berlaku adil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar : terlihat pada awal berita yang memperlihatkan para perempuan sedang mengikuti aksi demo untuk menolak omnibus law.</li> </ul>
------------------	--------------	--

#### a. Struktur sintaksis

Cara wartawan menyusun berita, dari segi judul wartawan memberi penjelasan bahwa RUU Omnibus Law ini berpotensi merugikan buruh perempuan hal ini juga tertera dalam kutipan Segera hentikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, karena berpotensi merugikan buruh perempuan kata Jumisih, selaku perwakilan koalisi buruh perempuan dan Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP).

Lead dari berita ini wartawan menuliskan dan menekankan kembali bahwa Koalisi buruh perempuan meminta DPR dan Pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law RU cipta kerja yang merupakan pernyataan sikap yang dibuat oleh para buruh perempuan dalam rangka memperingati Hari Kartini yang dirayakan pada tanggal 21 april.

#### b. Struktur Skrip

Sebagai sebuah artikel berita, artikel ini sudah memenuhi kelengkapan unsur 5W + 1H yang artinya dengan adanya kelengkapan unsur tersebut dapat menceritakan peristiwa yang ada.

#### c. Struktur Tematik

Penyusunan tematik, artikel berita ini secara tematik wartawan menuliskan pada setiap paragrafnya menekankan pada penolakan buruh perempuan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dianggap sangat merugikan kaum buruh dalam hal ini terutama buruh perempuan. Mulai dari koalisi kaum perempuan dengan Jumisih sebagai Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP). dan diperkuat dengan adanya pasal 93 ayat 2 UU ketenagakerjaan yang mengatur mengenai rinci tentang pengecualian tidak dibayarnya upah uruh akibat berhalangan termasuk bagi perempuan yang berada dalam masa haid hari pertama dan kedua.

#### d. Struktur Retoris

Unsur retoris dalam berita ini terletak juga pada Gambar, terletak pada awal paragraf memperlihatkan para buruh perempuan yang sedang menggelar aksi demo, demo tersebut dilakukan di sekitar Bundaran Patung Kuda, Jakarta dengan berlatar belakang gedung - gedung tinggi ibukota dan terlihat para buruh melakukan aksi demonya dengan membawa poster poster yang bertuliskan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja salah satu poster tersebut bertuliskan Hapuskan sistem kerja kontrak, demo tersebut dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dengan menyuarakan hak buruh yang belum terpenuhi.

## BERITA II

Judul : “Aktivis sebut Omnibus Law tidak berpihak pada perempuan, ini sebabnya.”<sup>54</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Aktivis sebut omnibus law tidak berpihak pada perempuan
	Lead	Koordinator perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi menilai, RUU omnibus law tidak berpihak kepada perempuan.
	Latar Informasi	Penolakan RUU onibus law karena dinilai tidak berpihak dan semakin mengeliminasi hak – hak perempuan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi terhadap proses produksi disuatu perusahaan.
	Kutipan Sumber	<p>Mutiara ika pratiwi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa tidak ada satupun pasal (yang terdapat) kata perempuan dalam RUU yang beredar</li> <li>• Tidak ada satu kata pun yang menyebut perempuan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi terhadap produksi</li> <li>• Kita melihat di UU yang sudah ada pun masih ada kesenjangan dan kekurangan yang harusnya direvisi. Oleh pemerintah, malah dirapel omnibus law</li> <li>• Orang hamil butuh perlakuan khusus karena tubuhnya berubah. Ini bertolak belakang dari logika industry dan investasi</li> </ul> <p>Airlangga hartanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadi ini kami jadwalkan agar bisa selesai di akhir minggu ini.</li> </ul>
	Penutup	RUU Omnibuslaw telah berada ditahap finalisasi yag artinya akan segera rampung dan diresmikan. Mecipun Omnibus law sendiri telah mendapat banyak penolakan dari beberapa pihak, termasuk dari perepuann Mahardika karena didalam RUU tersebut tidak ada satupun yang menyebut kan secara spesifik

<sup>54</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/19/20473131/aktivis-sebut-omnibus-law-tidak-berpihak-pada-perempuan-ini-sebabnya>

		kata perempuan atau hak – hak perempuan didalamnya. Dan hal tersebut dinilai semakin mengeliminasi hak – hak perempuan.
	<i>What</i>	Tidak disebutnya perempuan dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja membuat coordinator perempuan Mahardika yakni Mutiara Ika Pratiwi menilai RUU ini tidak berpihak pada perempuan.
	<i>Where</i>	Jakarta, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
	<i>When</i>	Minggu, 19 Januari 2020
	<i>Who</i>	Mutiara Ika Pratiwi dan Airlangga Hartanto
	<i>Why</i>	Karena omnibus law dinilai semakin mengeliminasi hak perempuan maka dari itu
	<i>How</i>	Diketahui bahwa, Tidak disebutnya perempuan dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja membuat coordinator perempuan Mahardika yakni Mutiara Ika Pratiwi menilai RUU ini tidak berpihak pada perempuan. Kedua, hak perempuan sebagai pekerja pada undang – undang yang berlaku saat ini sudah terbilang sedikit dan dengan hadirnya Omnibus law tentu semakin mengeliminasi hak perempuan. Ketiga, Omnibus Law telah memasuki tahap finalisasi yang artinya semua poin dalam 11 klaster yang dibahas dalam UU Cipta lapangan kerja, termasuk klaster ketenagakerjaan akan rampung secepatnya.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Artikel ini secara tematik menekankan pada pandangan terhadap RUU Omnibus law yang tidak berpihak pada perempuan. Dalam kasus ini banyak aktivis yang menentang salah satu contoh ialah Koordinator perempuan mahardika yakni Mutiara Ika Pratiwi yang dengan tegas menolak RUU ini. Apalagi dengan ditambahkan pernyataan dari Menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga hartanto bahwa RUU Omnibus Law yang telah dalam tahap finalisasi.
	Kata, Idiom,	• Penggunaan Kata “finalisasi” artinya adalah tahap

Struktur Retoris	Gambar/fisik	akhir, dalam hal ini Omnibus law pembahasannya sudah pada tahap makhir. Kata “Klaster” artinya pengelompokkan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengelompokkan ketenagakerjaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar : terlihat pada awal berita yang memperlihatkan para aktivis sedang menggelar diskusi publik (sesuai dengan isi berita).</li> </ul>
------------------	--------------	--

a. Struktur sintaksis

Cara wartawan menyusun berita dengan menyampaikan awal paragraf yaitu pada Lead berita dapat kita lihat fakta yang langsung dibenarkan oleh koordinator perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi yang menilai, RUU Omnibus Law tidak berpihak pada perempuan. Ditambah dengan keterangannya dalam diskusi publik yang digelar di kantor LBH Jakarta dan bertajuk ‘Omnibus Law untuk siapa?’ yang mengatakan Bahwa tidak ada satu pasal pun (yang terdapat) kata Perempuan dalam RUU yang beredar.

b. Struktur Skrip

Struktur skrip sendiri ialah bagaimana cara wartawan mengisahkan sebuah fakta dan dalam skrip juga terdapat komponen berita yang berisikan 5W + 1H, dan pada berita tersebut komponen tersebut sudah mencakup semuanya.

c. Struktur Tematik

Tematik ialah bagaimana cara wartawan menulis fakta, artikel ini menekankan pada pandangan aktivis terhadap Omnibus Law yang tidak berpihak pada perempuan hal ini juga tertera pada judul serta Lead dari berita ini. Yang menjelaskan kekecewaan aktivis terhadap adanya RUU Omnibus Law ini, Apalagi dengan ditambahkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto bahwa

RUU Omnibus Law yang telah dalam tahap finalisasi yang tentunya semakin membuat kecewa.

#### d. Struktur Retoris

Dalam artikel berita ini, unsur retorik dapat dilihat dalam kalimat RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja sudah masuk tahap Finalisasi. Ulas kata Finalisasi dalam kalimat ini wartawan tidak menjelaskan apa arti sesungguhnya dari kalimat tersebut karena pada nyatanya masih banyak hal kontra yang terus ada karena memang RUU ini dianggap kurang transparan dan terlalu cepat.

Kalimat yang lain adalah pernyataan dari Airlangga Hartanto yang menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan semua poin dalam 11 klaster yang akan dibahas di dalam UU Cipta lapangan kerja, termasuk yang selama ini di perdebatkan, yaitu Klaster ketenagakerjaan, ulas kata Klaster dalam kalimat ini adalah kelompok ketenagakerjaan.

Gambar, terletak pada awal berita yang memperlihatkan para Aktivis sedang menggelar dan berdiskusi dalam suatu diskusi publik yang berjudul Omnibus Law Untuk Siapa? kegiatan ini digelar di Kantor LBH Jakarta pada hari Minggu dibulan Januari 2020.

### BERITA III

Judul : “FRI; Perlindungan Pekerja Perempuan Terdampak RUU Cipta Kerja.”<sup>55</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	FRI; Perlindungan Pekerja Perempuan Terdampak RUU Cipta Kerja
	Lead	Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai omnibus law RUU cipta kerja sangat merugikan pekerja perempuan.
	Latar Informasi	RUU omnibus law cipta kerja dianggap telah merugikan pekerja perempuan melalui beberapa pasal yang ada didalamnya. Maka dari itu FRI menolak karena RUU ini telah mengabaikan nilai – nilai demokrasi.
	Kutipan Sumber	Keseluruhan sumber berita mengambil dari pernyataan Nining Elitos : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan pekerja akan paling terdampak dengan RUU cilaka karena dihapusnya ketentuan perlindungan</li> <li>• Perempuan yang mengambil cuti haid, cuti hamil/keguguran, dan menyusui saat bekerja sehingga otomatis tidak mendapat upah</li> <li>• Pemerintah dan DPR seharusnya menyusun undang – undang untuk melindungi dan menyuarakan suara rakyat yang terdampak regulasi</li> <li>• Omnibus law RUU cilaka membawa kita lebih jauh dari demokrasi yang kita cita – citakan. Oleh karena itu, FRI menolak secara keseluruhan omnibus law RUU cilaka yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi.</li> </ul>
	Penutup	Salah satu pasal yang ada dalam RUU Cipta kerja yakni pasal 93 bab IV ayat 1 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai upah yang tidak akan dibayarkan apabila pekerja tidak melakukan

<sup>55</sup> <https://search.kompas.com/search/?q=FRI%3B+Perlindungan+Pekerja+Perempuan+Terdampak+RUU+Cipta+Kerja&submit=Submit>

		pekerjaannya, hal tersebut dinilai mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan merugikan pekerja khususnya pekerja perempuan.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Nining Elitos perwakilan dari FRI menilai RUU Omnibus Law ini dapat sangat merugikan pekerja perempuan apalagi dengan dihapuskannya ketentuan upah cuti, haid dan melahirkan
	<i>Where</i>	Jakarta, depan Gedung DPR
	<i>When</i>	Jumat, 21 februari 2020
	<i>Who</i>	Nining Elitos
	<i>Why</i>	Karena, dihapusnya ketentuan perlindungan terhadap perempuan dalam Omnibus Law dinilai oleh Federasi Rakyat Indonesia (FRI) dapat merugikan pekerja perempuan
	<i>How</i>	Diketahui bahwa pasal dalam RUU Omnibus Law cipta kerja mengatur bahwa pekerja akan mendapat upah jika menyelesaikan pekerjaannya, ini artinya pagu pekerja perempuan yang sedang mengambil hak cutinya tidak mendapat bayaran utuh. Kedua, DPR dan pemerintah dianggap tidak menyusun undang – undang yang tidak berpihak pada rakyat dan hal tersebut jauh dari cita-cita demokrasi.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Artikel ini secara tematik menjelaskan bagaimana Nining Elitos mewakili para kaum pekerja perempuan menyatakan kerugian apa saja yang dialami oleh pekerja perempuan jika ketentuan perlindungan dihapuskan.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kata “Demokrasi”, artinya demorkasi sendiri ialah bentuk suatu pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dalam hal ini dengan disahkannya</li> </ul>

		<p>RUU Omnibus Law Cipta kerja dapat merebut hak-hak warga dari negara itu sendiri.</p> <p>Arti kata “Regulasi”, artinya adalah peraturan yang tujuannya untuk mengatur tatanan masyarakat tertentu. Dalam hal ini regulasi yang dimaksud adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar : terletak di atas pada awal paragraf yaitu memperlihatkan suasana aksi demo dan spanduk yang berisikan tuntutan penolakan terhadap omnibus law</li> </ul>
--	--	--

#### a. Struktur sintaksis

Secara sintaksis dapat dilihat dari bisa kita lihat dari judul yaitu FRI; Perlindungan Pekerja Perempuan Terdampak RUU Cipta Kerja dan diperjelas lagi oleh Lead dari berita tersebut yakni Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai omnibus law RUU cipta kerja sangat merugikan pekerja perempuan dan dalam hal ini yang dimaksud merugikan pekerja perempuan yaitu karena pasal-pasal yang ada dalam RUU Omnibus law cipta kerja ini yang menghapuskan ketentuan perlindungan terhadap para pekerja perempuan dan hal ini ditegaskan dalam pernyataan Nining Elitos sebagai perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Omnibus law RUU Cipta Kerja membawa kita lebih jauh dari demokrasi yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, FRI menolak secara keseluruhan omnibus law RUU cipta kerja yang mengabaikan nilai - nilai demokrasi.

#### b. Struktur Skrip

Sebagai sebuah artikel berita, artikel ini telah memenuhi kelengkapan dalam unsur skrip yakni 5W + 1H. dan karena adanya kelengkapan unsur tersebut sehingga dapat menceritakan peristiwa yang terjadi dalam membingkai berita.

#### c. Struktur Tematik

Dalam artikel ini, wartawan menuliskan fakta disetiap paragrafnya yakni bagaimana nining mewakili para kaum pekerja perempuan menyatakan kerugian apa saja yang dialami oleh pekerja perempuan jika ketentuan perlindungan dihapuskan. Salah satu yang disuarakan adalah mengenai cuti haid, cutihamil/keguguran, dan pada saat menyusui atau memerah ASI pada jam kerja tidak akan dianggap sedang bekerja sehingga tidak mendapat upah hal tersebut tercantum dalam pasal 93 bab IV tentang Ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja.

#### d. Struktur Retoris

Penggunaan kata Demokrasi pada kalimat “FRI menolak secara keseluruhan omnibus law RUU cilaka yang meengabaikan nilai - nilai demokrasi” yang berada pada paragraf terakhir ini memiliki arti demokrasi sendiri ialah bentuk suatu pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Dalam hal ini dengan disahkannya RUU Omnibus Law Cipta kerja dapat merebut hak-hak warga dari negara itu sendiri.

Gambar, terletak pada awal berita yaitu memperlihatkan seorang wanita dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap RUU Cipta lapangan Kerja di Depan gedung DPR, Jakarta.

## BERITA IV

Judul : *“Tolak Omnibus Law, Buruh Perempuan Gelar Aksi Demo.”*<sup>56</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Tolak Omnibus Law, Buruh Perempuan Gelar Aksi Demo.
	Lead	Ketua departemen komunikasi dan media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono mengatakan aksi demo buruh perempuan dilakukan untuk menolak omnibus law RUU cipta kerja.
	Latar Informasi	Aksi demo yang dilakukan oleh para buruh perempuan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional ini dilakukan untuk menolak omnibus law RUU cipta kerja.
	Kutipan Sumber	Berita ini mengambil pernyataan dari dua orang yakni Kahar S.Cahyono dan Roro Dwi Handayani. Kahar S.Cahyono : “Kaintannya, sebelum disahkan sudah banyak buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan undang - undang nomor 13 tahun 2003. apalagi kalau nanti dalam omnibus law” Roro Dwi Handayani : “Tuntutannya agar manajemen menghormati hasil kunjungan kerja DPR dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menghentikan PHK karena dilakukan tidak sesuai undang - undang dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)” “Kita belum menuntut ke Menteri perempuan, baru minta audiensi ke kementerian BUMN, Komnas HAM dan OJK”
	Penutup	Aksi yang digelar oleh para buruh perempuan yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional ini bukanlah tanpa tujuan, aksi digelar guna menuntut keadilan karena banyaknya PHK karyawan oleh perusahaan yang sangat tinggi yang tentu sangat merugikan pekerja, maka dari itu kaum buruh

<sup>56</sup> <https://pemilu.kompas.com/read/2020/03/06/172013026/tolak-omnibus-law-buruh-perempuan-gelar-aksi-demo>

		perempuan ingin melakukan audiensi dengan menteri perempuan, kementerian BUMN, Komnas HAM, dan OJK sebagai upayanya.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Dalam merayakan Hari Perempuan Internasional para buruh perempuan memilih untuk memperjuangkan haknya dengan cara menggelar aksi demo untuk menolak adanya Omnibus law Cipta Kerja.
	<i>Where</i>	Sekitar Monas, Jakarta Pusat
	<i>When</i>	Jumat, 6 Maret 2020
	<i>Who</i>	Kahar S.Cahyono dan Roro Dwi Handayani
	<i>Why</i>	Karena, semakin banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta banyak pekerja atau buruh perempuan yang termarginalkan maka tepat pada Hari Perempuan Internasional para buruh perempuan menggelar aksinya sebagai sebuah penolakan akan adanya Omnibus Law cipta kerja ini.
	<i>How</i>	Diketahui bahwa, tuntutan yang dilayangkan oleh para buruh perempuan di sekitar monas tersebut guna menolak adanya Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan pekerja perempuan apalagi dengan banyak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan oleh perusahaan dengan tanpa mengindahkan ketentuan pada Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Secara tematik muatan pada artikel ini lebih menekankan pada tuntutan yang dilayangkan oleh para buruh perempuan mengenai banyaknya PHK yang jelas merugikan pekerja. Hal ini disampaikan oleh Roro sebagai Presiden Serikat Pekerja Indosat (SP Indosat).
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/fisik	Penggunaan kata “Mengindahkan” artinya ialah memperhatikan, dalam hal ini yang dimaksud adalah sebab dari banyaknya PHK yang terjadi ialah karena Omnibus law dinilai tidak memperhatikan undang undang sebelumnya yakni nomor 13 tahun 2003.

		Gambar : Terlihat pada awal berita, terlihat ratusan buruh perempuan sedang menggelar aksi demoguna memperingati Hari Perempuan Internasional dan menyuarkan hak buruh yang belum terpenuhi
--	--	---

a. Struktur sintaksis

Secara sintaksis cara wartawan menyusun fakta dapat dilihat dari judul yakni “Tolak Omnibus Law, Buruh Perempuan Gelar Aksi Demo”. dan juga bisa kita lihat dari Lead yang juga diperjelas dengan Kahar S.Cahyono selaku Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSIP) yang mengatakan bahwa Aksi demo buruh perempuan dilakukan untuk menolak omnibus law RUU cipta kerja, kaitannya, sebelum omnibus disahkan sudah banyak buruh yang di PHK tanpa mengindahkan ketentuan undang - undang Nomor 13 tahun 2003 apalagi nanti dalam omnibus law. Aksi demo yang dilakukan oleh para buruh perempuan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional ini dilakukan untuk menolak omnibus law RUU cipta kerja.

b. Struktur Skrip

Sebagai sebuah artikel berita, berita ini telah memenuhi unsur skrip yakni 5W +1H yang mana hal tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi dalam pembingkaiian berita.

c. Struktur Tematik

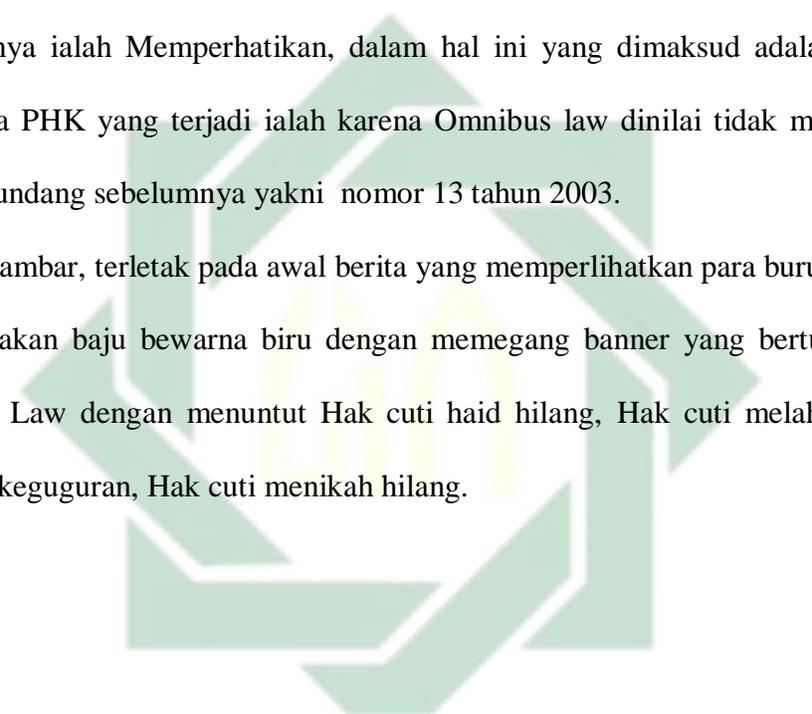
Pada artikel ini, struktur tematik dijelaskan pada setiap paragraf dalam berita ini, setiap paragraf dalam artikel berita ini menjelaskan bahwa kaum pekerja khususnya kaum perempuan sangat dirugikan, banyaknya PHK karyawan oleh perusahaan secara sepihak adalah suara utama yang digaungkan oleh para pekerja perempuan pada aksi

demo yang juga sekaligus dilakukan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional.

#### d. Struktur Retoris

Penggunaan kata “Mengindahkan” pada kata pernyataan Kahar S. Cahyono yang artinya ialah Memperhatikan, dalam hal ini yang dimaksud adalah sebab dari banyaknya PHK yang terjadi ialah karena Omnibus law dinilai tidak memperhatikan undang - undang sebelumnya yakni nomor 13 tahun 2003.

Gambar, terletak pada awal berita yang memperlihatkan para buruh perempuan menggunakan baju berwarna biru dengan memegang banner yang bertuliskan Tolak Omnibus Law dengan menuntut Hak cuti haid hilang, Hak cuti melahirkan hilang, Hak cuti keguguran, Hak cuti menikah hilang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## 2. Analisis Framing Berita Tempo.com

### BERITA I

Judul : “RUU Omnibus Law Dinilai Ancam Pekerja Perempuan”<sup>57</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	RUU Omnibus Law Dinilai Ancam Pekerja Perempuan.
	Lead	Mutiara Ika Pratiwi dari Lembaga Perempuan Mahardika menyebut Omnibus Law merupakan ancaman bagi pekerja perempuan.
	Latar Informasi	Lembaga perempuan mahardika menilai undang – undang baru yakni RUU Omnibus law dapat mengancam pekerja perempuan.
	Kutipan Sumber	Keseluruhan artikel hanya pernyataan dari ika :Di undang-undang Nomor 13 tahun 2003, hak perempuan disebut normative. Di Omnibus Law tidak ada hak khusus perempuan dan Penyediaan lapangan kerja tidak untuk meningkatkan kualitas. Hanya untuk menambah bisa hidup hari ini dan tidak mati esok harinya.
Struktur Skrip	Penutup	Pemerintah bermaksud membuat lapangan pekerjaan melalui RUU omnibus law cipta kerja, namun mengesampingkan hak perempuan yang bahkan hak perempuan secara spesifik tidak disebut didalamnya. Hal ini menjadikan Omnibus law sebagai ancaman bagi para pekerja perempuan.
	<i>What</i>	Lembaga perempuan Mahardika menyebut Omnibus Law tidak ramah perempuan, Karena tidak ada satupun pasal didalamnya mengenai perempuan satu kata pun.
	<i>Where</i>	Jakarta, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

<sup>57</sup><https://nasional.tempo.co/read/1297026/ruu-omnibus-law-dinilai-ancam-pekerja-perempuan>

	<i>When</i>	Minggu, 19 Januari 2020
	<i>Who</i>	Mutiara Ika Pratiwi
	<i>Why</i>	Karena, upaya pemerintah dalam menambah lapangan kerja melalui RUU Omnibus Law Cipta kerja ini malah tidak berjalan dengan baik karena dinilai banyak merugikan para pekerja apalagi pekerja perempuan, maka dari itu lembaga perempuan Mahardika menyebut Omnibus Law sebagai ancaman bagi pekerja perempuan.
	<i>How</i>	Diketahui bahwa, karena tidak adanya pembahasan perempuan dalam RUU yang Omnibus Law maka lembaga perempuan mahardika diwakili dengan Mutiara ika pratiwi memperjuangkan hak perempuan Kedua, dalam Omnibus Law cipta kerja tidak ada satupun dalam pasalnya yang spesifik menyebutkan kata perempuan. Ketiga, pemerintah berupaya untuk menambah lapangan pekerjaan melalui Omnibus Law tetapi tidak memperdulikan kualitas kehidupan para pekerjanya.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Artikel ini secara tematik lebih menekankan pada pernyataan Ika yang juga mewakili perempuan untuk memperjuangkan haknya karena tidak adanya satupun pasal mengenai perempuan dalam Omnibus Law.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kata “Patriarki” bermakna sebuah sistem sosial yang menempatkan laki – laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan lebih mendominasi, Kata “Reproduksi” artinya suatu proses biologis atau suatu organisme yang baru dibuat, dan merupakan cara dasar yang dilakukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dalam hal ini membicarakan tentang proses reproduksi wanita terhadap sistem kerja.</li> <li>• Gambar : terlihat pada awal berita yang memperlihatkan para buruh sedang mengikuti aksi demo untuk menolak omnibus law.</li> </ul>

a. Struktur sintaksis

Dari unsur sintaksis dapat dilihat dari cara wartawan menyusun fakta melalui judul yang dipilih yaitu RUU Omnibus Law Dinilai Ancam Pekerja Perempuan, sangat cukup menjelaskan inti kasus yang akan dibahas dalam berita ini. Selain itu diperkuat dengan Lead yang berisikan pernyataan Mutiara Ika Pratiwi dari Lembaga Perempuan Mahardika yang menyebut Omnibus Law merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup pekerja perempuan. Dan menilai tidak ada satupun dalam undang undang tersebut yang pasalnya mengenai perempuan atau mengandung kata perempuan.

b. Struktur Skrip

Struktur Skrip dalam artikel berita ini sudah lengkap dengan memenuhi unsur 5W +1H yang artinya berita ini telah dibilang dapat menjelaskan bagaimana Omnibus Law dapat sangat merugikan kaum pekerja apalagi pekerja perempuan.

c. Struktur Tematik

Cara wartawan menuliskan sebuah fakta adalah dengan menampilkan pernyataan - pernyataan dari Mutiara Ika Pratiwi yang dalam setiap pernyataannya sangat mewakili perempuan untuk memperjuangkan haknya karena tidak adanya satupun pasal yang ramah terhadap perempuan dalam Omnibus Law.

d. Struktur Retoris

Dalam penggunaan kata “Patriarki” dalam kata kerja reproduksi tidak dianggap kerja yang menopang produksi kapital dalam sistem kerja produksi patriarkinya adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan lebih mendominasi.

Kata “Reproduksi” dalam kata yang sama juga, artinya suatu proses biologis atau suatu organism yang baru dibuat, dan merupakan cara dasar yang dilakukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dalam hal ini membicarakan tentang proses reproduksi wanita terhadap sistem kerja.

Gambar, terletak pada awal berita yang memperlihatkan sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dengan memegang banner bertuliskan “Omnibus Law Tolak RUU Cilaka didepan gedung DPR/MPR RI, Jakarta.”



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BERITA II

Judul : “Alasan Komnas Perempuan Minta RUU Cipta Kerja Dibatalkan”<sup>58</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Alasan Komnas Perempuan Minta RUU Cipta Kerja Dibatalkan
	Lead	Komisi nasional perempuan meminta pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU cipta kerja.
	Latar Informasi	Komnas perempuan mempermasalahkan RUU cipta kerja yang lebih berpihak kepada pengusaha atau pemodal dan tidak memperdulikan hak para pekerjanya.
	Kutipan Sumber	Artikel ini hanya memuat satu kutipan sumber yaitu Riny Hutabarat : RUU tersebut berpotensi memngancam kesejahteraan pekerja dan buruh
	Penutup	Komnas perempuan telah mengkaji draft RUU Cipta Kerja berpendapat bahwa RUU ini tidak memperhatikan hak pekerja perempuan dan malah berpihak pada pengusaha dan pemilik modal. Hal ini yang kemudian membuat Komisi Nasional Perempuan meminta pemerintah dan DPR untuk membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Komnas perempuan yang meminta RUU Omnibus law cipta kerja dibatalkan karena berpotensi merebut kesejahteraan perempuan.
	<i>Where</i>	Jakarta, Di depan gedung DPR RI

<sup>58</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1335199/alasan-komnas-perempuan-minta-ruu-cipta-kerja-dibatalkan>

	<i>When</i>	Jum'at, 24 April 2020
	<i>Who</i>	Rainy Hutabarat
	<i>Why</i>	Karena, komnas perempuan dalam hal ini memiliki alasan untuk menuntut hak para pekerja dan buruh terutama adalah kaum perempuan dengan banyaknya pasal atau kebijakan yang tidak ,menhadirkan keadilan bagi perempuan.
	<i>How</i>	Diketahui bahwa, sebelum komnas perempuan meminta RUU Omnibus law di batalkan, komnas perempuan telah mengkaji draft RUU cipta kerja dan menemukan politik hukum didalamnya yang berupa ekosistem investasi dan kemudahan berusaha . Kedua, sistem pengupahan pada pekerja atau buruh dinilai tidak memperhatikan hak serta kepentingan para pekerja itu sendiri.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Artikel ini secara tematik lebih menekankan pada pernyataan dari pihak komnas perempuan, yakni Rainy hutabarat yang meminta pemerintah agar membatalkan pembahasan omnibus law.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/fisik	Penggunaan kata “Ekosistem investasi” dapat dipahami sebagai kegiatan berusaha yang sesuai dengan undang – undang, Kata “Fleksibilitas” artinya adalah sesuatu yang tidak tetap, dalam hal ini peraturan atau ketetapan untuk para pengusaha dapat mudah dirubah. Gambar : terletak diatas, diawal paragraf yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengikuti demo dan menunjukkan

a. Struktur sintaksis

Dengan mengamati judul kita sudah dapat mengetahui bahwa wartawan akan menjelaskan alasan - alasan yang menjadikan komnas perempuan meminta agar RUU omnibus law cipta kerja ini dibatalkan. Begitupun dengan Lead yang ada juga menjelaskan bahwa Komisi Nasional Perempuan meminta pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU cipta kerja, hal tersebut terjadi karena Komnas perempuan mempermasalahkan RUU cipta kerja yang lebih berpihak kepada pengusaha atau pemodal dan tidak memperdulikan hak para pekerjanya.

b. Struktur Skrip

Struktur skrip sendiri ialah bagaimana cara wartawan mengisahkan sebuah fakta dan dalam skrip juga terdapat komponen berita yang berisikan 5W + 1H, dan pada berita tersebut komponen tersebut sudah mencakup semuanya.

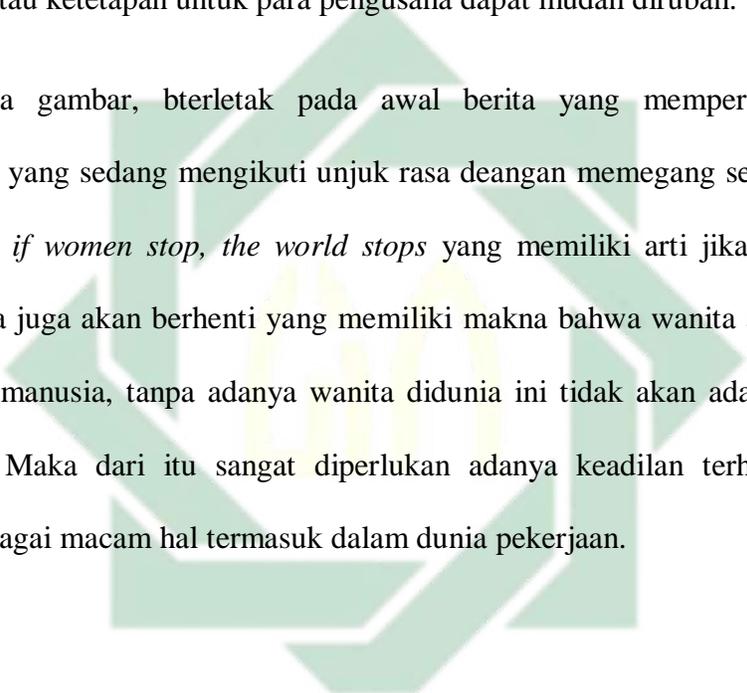
c. Struktur Tematik

Cara wartawan menuliskan fakta adalah dengan menekankan pada pernyataan dari Rainy dan Komnas Nasional Perempuan yang mendesak pemerintah agar membatalkan pembahasan Omnibus law. Struktur tematik juga ada pada dua paragraf terakhir pada berita yakni mengenai Komnas perempuan yang juga berpendapat bahwa RUU cipta kerja tak memperhatikan sejumlah hak pekerja perempuan dan juga disini komnas juga menyoroti fleksibilitas RUU Cipta kerja terhadap pengusaha dalam standart pengupahan dan kontrak kerja.

#### d. Struktur Retoris

Dalam artikel berita ini, unsur retorik ada pada penggunaan kata “Ekosistem investasi” dalam hal ini artinya adalah kegiatan berusaha yang sesuai dengan undang – undang, Kata “Fleksibilitas” artinya adalah sesuatu yang tidak tetap, dalam hal ini peraturan atau ketetapan untuk para pengusaha dapat mudah dirubah.

Pada gambar, terletak pada awal berita yang memperlihatkan seorang perempuan yang sedang mengikuti unjuk rasa dengan memegang sebuah papan yang bertuliskan *if women stop, the world stops* yang memiliki arti jika wanita berhenti, maka dunia juga akan berhenti yang memiliki makna bahwa wanita adalah kehidupan bagi umat manusia, tanpa adanya wanita didunia ini tidak akan ada kehidupan yang seimbang. Maka dari itu sangat diperlukan adanya keadilan terhadap perempuan dalam berbagai macam hal termasuk dalam dunia pekerjaan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BERITA III

Judul : *“Hari Kartini, Buruh Perempuan Minta Omnibus Law Dihentikan.”*<sup>59</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Hari Kartini, Buruh Perempuan minta Omnibus Law di Hentikan.
	Lead	Para buruh FBLP Jakarta, SP Mediaasafe Medan, DBTK Sulawesi Tenggara, SPEMI Karawang mengeluarkan surat pernyataan sikap dalam rangka memperingati hari Kartini, 21 April 2020. Dalam suratnya, para buruh menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi ditengah masa pandemi corona.
	Latar Informasi	Tepat pada hari Kartini, buruh perempuan dari beberapa daerah melakukan aksi demo yang bertujuan agar pemerintah menghentikan pembahasan omnibus law karena buruh perempuan menganggap RUU ini semakin merugikan dan mengancam keberlanjutan hidup mereka.
	Kutipan Sumber	Keseluruhan artikel hanya mengambil pernyataan dari Jumisih : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kami buruh perempuan, yang juga merupakan generasi Kartini era ini adalah bagian dari jutaan buruh perempuan yang kini menghadapi situasi darurat corona, menghadapi beban dan tekanan yang luar biasa.</li> <li>• Ketiga, sebagian dari kami sudah dirumahkan tanpa diberi upah penuh dan di-PHK sepihaktanya mendapatkan pesangon. Kinerja pengawasan</li> </ul>

<sup>59</sup><https://metro.tempo.co/read/1333968/hari-kartini-buruh-perempuan-minta-omnibus-law-dihentikan>

		<p>ketenagakerjaan sangat lambat dan nyaris tidak peduli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sementara oleh pemerintah kami dihimbau untuk tidak pulang kampung, tapi keberadaan kami di Jakarta tidak mendapat perlindungan yang baik</li> <li>• Hal ini berakibat memancing kemarahan buruh dan rakyat untuk melakukan aksi jika pembahasan oleh Baleg tidak dihentikan</li> <li>• Oleh karena itu, dalam rangka memoeringati hari kartini, kami memaknai semangat perjuangan kartini dalam melawan kolonialisme dengan terlibat dan mempelopori perjuangan pembebasan perempuan</li> <li>• Serta memaksimalkan kinerja pengawas ketenagakerjaan atas situasi perburuhan saat ini, untuk memastikan hak pekerja didapat, di saat butuh dirumah atau dikurangi jam kerjanya.</li> </ul>
	<p>Penutup</p>	<p>Dalam memaknai semangat perjuangan Kartini, kaum buruh perempuan dari beberapa wilayah di Indonesia menyatukan kekuatannya untuk memperoleh kembali hak – hak mereka dan menginginkan agar RUU Omnibus Law dihapuskan, karena dinilai telah mendiskriminasi para pekerja dengan peraturan – peraturan yang tidak berpihak pada rakyat terutama para buruh dan kaum perempuan.</p>
<p>Struktur Skrip</p>	<p><i>What</i></p>	<p>Dengan dirasa banyaknya dampak negatif dari adanya omnibus law RUU cipta kerja ini maka digelar aksi demonstrasi yang dilakukan tepat di hari kartini ini bertujuan agar omnibus law dihentikan dari pembahasan DPR dan pemerintah.</p>

	<i>Where</i>	Di depan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	<i>When</i>	Jumat, 6 maret 2020
	<i>Who</i>	Jumisih
	<i>Why</i>	Karena, RUU omnibus law dinilai akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup buruh perempuan.
	<i>How</i>	Diketahui, bahwa dari aksi yang digelar Jumisih menyatakan terdapat 4 hal yang menjadi permasalahan para buruh perempuan. Pertama, buruh harus tetap bekerja dibawah ancaman virus corona dengan alat lindung seadanya. Kedua, buruh perempuan mengalami dilemma karena harus bekerja. Ketiga, sebagian pekerja telah dirumakan, tidak diberi upah penuh bahkan beberapa pekerja juga terkena PHK. Keempat, buruh perempuan serta keluarganya juga terancam kehilangan tempat tinggal karena tidak sanggup lagi membayar tagihan indekos.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Artikel ini secara tematik menekankan perhatian terhadap pernyataan Jumisih selaku ketua federasi buruh lintas pabrik (FBLP) pada aksi demo 21 April 2020.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kata “Indekos” artinya adalah sebuah atau sepetak bangunan yang disewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kata “Diskriminasi” artinya sikap (mayoritas) membedakan secara sengaja terhadap suatu golongan (minoritas) yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Kata “Kolonialisme” artinya sistem dimana</li> </ul>

		<p>suatu negara menguasai rakyat serta sumber daya negara lain dan bertingkah semaunya. dalam hal ini kolonialisme hanya sebagai perumpamaan saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar : terlihat pada awal berita yang memperlihatkan para perempuan sedang mengikuti aksi demo untuk menolak omnibus law.</li> </ul>
--	--	--

a. Struktur sintaksis

Unsur sintaksis pada berita ini ditunjukkan pada pemilihan judul oleh wartawan, yang mana judul dari berita ini adalah Hari Kartini, Buruh Perempuan minta Omnibus Law di Hentikan. Yang pada lead nya juga menuliskan beberapa persatuan dari buruh diberbagai wilayah yang menggelar aksi demo tepat pada hari Kartini yang bertujuan agar pemerintah menghentikan pembahasan omnibus law karena buruh perempuan menganggap RUU ini semakin merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

b. Struktur Skrip

Unsur skrip pada artikel berita ini telah dipenuhi karena unsur 5W + 1H telah ada dalam artikel berita ini, sehingga dapat menjelaskan berita ini secara lebih detail.

c. Struktur Tematik

Cara wartawan menuliskan fakta melalui unsur tematik ini ialah melalui penekanan pernyataan hal - hal yang menjadi permasalahan buruh perempuan oleh jumisih selaku ketua umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) pada aksi demo 21 April 2020.

#### d. Struktur Retoris

Penggunaan kata “Diskriminasi” artinya sikap (mayoritas) membedakan secara sengaja terhadap suatu golongan (minoritas) yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Yang dimaksud dalam hal ini ialah adanya diskriminasi yang terjadi pada pekerja perempuan yakni banyak hak - hak perempuan yang seharusnya mereka dapatkan dihapus begitu saja.

Gambar, terlihat pada awal berita yang memperlihatkan para perempuan sedang mengikuti aksi demo untuk menolak omnibus law didepan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengenakan baju serba hitam serta berhijab merah serta dibelakangnya terdapat ibu ibu berkerudung biru dengan baju berwarna putih, mereka semua membawa bendera serta banner.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BERITA IV

Judul : “*Massa Serukan Tolak Omnibus Law di Aksi Hari Perempuan Sedunia.*”<sup>60</sup>

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Ini Hak – Hak Pekerja Perempuan Jika Harus Bekerja Shift Malam.
	Lead	Untuk beberapa profesi, bekerja shift malam untuk perempuan sudah menjadi kewajiban.
	Latar Informasi	Untuk para pekerja perempuan yang harus bekerja shift malam tentu tidak mudah, maka dari itu perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan UU no.13 tahun 2003, yakni tentang kewajiban pengusaha yang memperkerjakan perempuan antara pukul 23:00 sampai pada pukul 07:00.
	Kutipan Sumber	<p>Keseluruhan artikel ini hanya diambil dari pernyataan Nining Elitos sebagai ketua umum konfederasi KASBI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU cilaka, yang dirugikan tidak hanya buruh, tidak hanya masyarakat adat, pesisir, tidak hanya masyarakat miskin kota, tetapi juga generasi bangsa kita, kaum pemuda.</li> <li>• Rakyat bersatu tolak RUU cilaka</li> <li>• Kita semakin besar, perlawanan hari ini adalah perlawanan agar rezim berpihak kepada rakyat!</li> </ul>
	Penutup	Penolakan terhadap Omnibus Law menjadi salah satu seruan aksi yang dilakukan bersamaan dengan hari perempuan internasional. Hal ini menandakan bahwa Omnibus Law cipta kerja ini sangat mempengaruhi kehidupan kaum perempuan terutama pekerja perempuan.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Aksi Demonstrasi yang berlangsung tepat pada hari perempuan sedunia ini dilakukan sebagai wujud penolakan terhadap kebijakan – kebijakan yang dinilai merugikan kaum perempuan.

<sup>60</sup><https://nasional.tempo.co/read/1316934/massa-serukan-tolak-omnibus-law-di-aksi-hari-perempuan-sedunia>

	<i>Where</i>	Jakarta pusat, Ruas jalan MH.Tamrirn
	<i>When</i>	Minggu, 8 maret 20020
	<i>Who</i>	Nining Elitos
	<i>Why</i>	Karena, jika RUU Omnibus law ini disahkan maka dianggap dapat merugikan buruh, tidak hanya itu masyarakat adat, masyarakat miskin kota dan juga perempuan tentu terkena dampaknya.
	<i>How</i>	Diketahui, bahwa dari aksi yang digelar pada hari perempuan sedunia tersebut menyerukan beberapa tuntutan. Pertama, penolakan terhadap omnibus law, selain itu banyak seruan lain dalam aksi tersebut. Kedua, orasi – orasi dari Nining Elitos sebagai ketua umum federasi KASBI dalam menuntun berjalannya demonstrasi.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Artikel ini secara tematik lebih menekankan pernyataan dari Nining elites tentang keadaan/kondisi pada aksi demo dihari Perempuan sedunia tersebut.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kata “RUU Cilaka” yang dimaksud adalah RUU omnibus law cipta kerja, karena dinilai merugikan banyak maka dari itu beberapa masyarakat menjulukinya sebagai RUU Cilaka. Kata “yel-yel” artinya ialah sorakan untuk member semangat. Dalam hal ini yel – yel pada saat demonstrasi. Kata “Diskriminatif”, artinya adalah membedakan – bedakan satu golongan dengan golongan lain dengan cenderung mengistimewakan salah satu golongan. Dalam hal ini diskriminatif terhadap para pekerja perempuan.</li> <li>• Gambar : berada di atas awal paragraph dan memperlihatkan buruh yang sedang melakukan aksi demo dengan membawa spanduk bertuliskan “Tolak Omnibus Law”.</li> </ul>

a. Struktur sintaksis

Dari kita melihat judulnya saja kita dapat mengetahui bagaimana wartawan menyusun kata, dengan judul Ini Hak – Hak Pekerja Perempuan Jika Harus Bekerja Shift Malam, wartawan ingin menyampaikan hak yang seharusnya pekerja perempuan dapatkan apabila bekerja malam hari. Dari lead juga bisa kita lihat bahwa untuk beberapa profesi, bekerja shift malam untuk perempuan sudah menjadi kewajiban, maka dari itu perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003, yakni Tentang kewajiban pengusaha yang memperkerjakan perempuan antara pukul 23:00 sampai pada pukul 07:00.

b. Struktur Skrip

Struktur skrip ialah bagaimana cara wartawan mengisahkan sebuah fakta dan dalam skrip juga terdapat komponen berita yang berisikan 5W + 1H, dan pada berita tersebut komponen tersebut sudah mencakup semuanya.

c. Struktur Tematik

Struktur tematik ialah bagaimana kita dapat mengetahui cara wartawan untuk menuliskan sebuah fakta, dalam berita ini secara tematik lebih menekankan pernyataan dari Nining elitos tentang keadaan/kondisi pada aksi demo dihari Perempuan sedunia tersebut yakni tertera dalam setiap pernyataannya pada berita tersebut.

#### d. Struktur Retoris

Penggunaan sktruktur retorisi dalam berita ini yaitu dengan penggunaan kata “RUU Cilaka” yang dimaksud adalah RUU omnibus law cipta kerja, karena dinilai merugikan banyak maka dari itu beberapa masyarakat menjulukinya sebagai RUU Cilaka karena dianggap sebagai pembawa mala petaka bagi buruh terutama buruh perempuan. Kata “Diskriminatif”, artinya adalah membeda-bedakan satu golongan dengan golongan lain dengan cenderung mengistimewakan salah satu golongan. Dalam hal ini diskriminatif terhadap para pekerja perempuan.

Gambar, terletak pada awal berita yang memperlihatkan persatuan buruh yang terbentuk dalam KSIP mengikuti demo dengan membawa banner panjang yang bertuliskan “Tolak Omnibus Law”, aksi demo tersebut digelar didepan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta. Yang dalam aksi tersebut selain sebagai aksi penolakan terhadap Omnibus law juga sekaligus memperingati hari perempuan sedunia 2020.

### **3. Analisis Pemandangan Framing Media Online Kompas.com dan Tempo.co Dalam Membingkai Berita Mengenai Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law.**

Pada kasus pemberitaan gender pada omnibus law ini sangat gencar diberitakan oleh banyak stasiun televisi, media cetak juga media online hampir pada semua media menjadikan pemberitaan tersebut sebagai headline dalam pemberitaannya. Misalnya situs online Kompas.com dan Tempo.co yang juga turut serta memberitakan hal tersebut dengan

peneliti yang melihatnya dari perspektif gender. Dari kedua situs itu, dalam menyajikan beritanya terdapat perbedaan dari sisi penulisan teks berita mengenai pemberitaan ini.

Untuk mengetahui bagaimana kedua situs berita online ini membingkai suatu peristiwa, dalam hal ini ialah pemberitaan gender dalam omnibus law cipta kerja maka berikut ialah tabel hasil perbandingan dari kedua media yaitu Kompas.com dan Tempo.co :

**Bagan 4.2 Perbandingan Content Berita**

Frame	Kompas.com	Tempo.co
<b>Sintaksis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Kompas.com Berita yang ada pada kompas.com dalam setiap beritanya banyak mengutip pernyataan dari pihak yang terlibat yakni pendemo atau tokoh perempuan yang ada didalamnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan pada Tempo.co lebih menyoroti fleksibilitas RUU Cipta kerja dalam bidang ekonominya.</li> <li>• Sedangkan Tempo.co lebih sedikit mengutip pernyataan dari satu pihak yang terlibat saja, mengutip bagian yang tidak menjelaskan permasalahan dan lebih banyak menampilkan opini dari wartawan saja.</li> </ul>
<b>Skrip</b>	<p>Dalam 4 berita yang ada disajikan diatas kompas mencatumkan struktur ini dengan menggunakan 5W + 1H dalam analisis framingnya dan sudah tertera secara lengkap tentang apa saja tuntutan yang dinilai merugikan buruh perempuan.</p>	<p>Sedangkan dalam Tempo.co juga serupa mencantumkan struktur skrip dengan unsur 5W+ 1H yang sudah tertera secara lengkap juga dengan membahas tentang tuntutan para buruh yang menilai bahwa omnibuslaw berpotensi mengancam kesejahteraan buruh perempuan dan juga kritik terhadap pemerintah akan hal itu.</p>
	Kompas.com menuliskan realitas pada	Sedangkan dengan Tempo.co tidak

<p><b>Tematik</b></p>	<p>beritanya dengan cukup detail, Kompas memberi ruang kepada pihak lain untuk menanggapi tuntutan yang ada pada beritanya dalam hal ini Kompas.com menyajikan tanggapannya dari dua sisi yaitu buruh dan juga pemerintah dalam beritanya.</p>	<p>memberikan kesempatan kepada yang tergugat dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengutarakan tanggapannya dalam masalah ini. Sehingga pada berita yang ada pada tempo hanya ada satu pihak yang bersuara yakni penuntut atau para buruh.</p>
<p><b>Retoris</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan kata yang dipakai dalam Kompas.com terkesan lebih halus, luak dan moderat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasionalis</li> <li>2. Kerugian buruh</li> <li>3. Mengeliminasi hak perempuan</li> <li>4. Diskriminasi</li> <li>5. Perlindungan perempuan</li> <li>6. upah</li> </ol> </li> <li>• Dalam berita Kompas.com ini wartawan menampilkan gambar yang mendukung dengan isi berita, tapi sayangnya pada salah satu beritanya yakni pada berita 3 tampilan gambar yang digunakan kurang tepat karena waktu pengambilan foto tidak sesuai dengan tanggal berita tersebut diterbitkan dan dalam foto tersebut juga tidak sesuai dengan judul yang ada yakni bukan FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) melainkan GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan kata yang dipakai mengartikan Omnibus law RUU cipta kerja dalam tempo sendiri terkesan lebih negatif serta ekspresif jika dilihat dari pilihan kata yang dipilih antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan sapu jagad</li> <li>2. RUU Cilaka</li> <li>3. Ancaman</li> <li>4. Tidak ramah perempuan</li> <li>5. Patriarki</li> <li>6. Keberpihakan Omnibus law pada pemilik modal</li> </ol> </li> <li>• Dalam semua berita yang diterbitkan oleh Tempo.co disini wartawan tidak sama sekali menggunakan gambar yang dapat mendukung dan sesuai isi berita tersebut.</li> </ul>

#### 4. Analisis Framing dengan Konstruktivisme Media

Dari perbandingan kedua portal berita diatas, bisa kita lihat melalui kaca mata paradigma konstruktivisme media, bahwa setiap media memiliki tujuan tersendiri terhadap berita yang disajikan kepada masyarakat, melalui framing setiap media dapat membentuk suatu realitas tertentu. Meskipun pers memiliki kode etik jurnalistik tapi tetap saja setiap perusahaan media massa memiliki cara penulisannya masing-masing, cara pandang terhadap suatu hal berbeda-beda, dan tentunya cara berpikir yang berbeda. Ketika jurnalis menulis berita, perspektif dan ideologi yang digunakan sangat berpengaruh pada tulisan mereka, kemudian melalui proses framing dan menjadi berita yang siap disajikan.

Seperti yang sudah tertera dalam paradigma konstruktivisme media massa yang ada pada teori konseptual diatas, Berger dan Luckman menjelaskan bahwa konstruksi sosial atau realitas terjadi secara stimulan melalui tiga tahapan yang biasa disebut sebagai segitiga dialektika, yaitu:

a. Eksternalisasi

Yaitu pengenalan dengan dunia luar atau realitas, maksudnya pada hal ini adalah mengenali bagaimana cara “Kompas.com dan Tempo.co” mengkonstruksi sebuah fakta yang ada sesuai dengan cara serta sudut pandang wartawan dan redaksi masing-masing dari media tersebut.

b. Objektivasi

Yaitu interaksi sosial dalam dunia intersubjektif atau antarindividu. Yang dimaksud dalam hal ini yakni setelah melewati tahap eksternalisasi yang berarti sudah mengenal bagaimana cara Kompas.com dan Tempo.co dalam mengelola berita yang

mereka sajikan kepada khalayak luas lalu berita tersebut diterima oleh masyarakat dan masyarakat menerimanya serta setuju akan realitas hasil konstruksi tersebut.

### c. Internalisasi

Yaitu seseorang yang setuju akan suatu realitas yang ada dan masuk dalam diri setiap orang sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud dalam hal ini yakni setelah berita tersebut melewati objektivitas yang berarti telah menerima semua realitas hasil dari konstruksi media tersebut dan masyarakat percaya akan hal itu lalu masuk dalam diri setiap orang sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran.

Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah *dialektika simultan*. Terdapat proses memunculkan apa yang ada di luar (eksternalisasi) agar tampak apa adanya, kemudian terdapat proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi), sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif. Realitas internal atau subyektif. Pemahaman objektif tentang realitas juga dikembangkan, dan individu dibentuk sebagai produk sosial melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi. Hal ini memungkinkan untuk mengatakan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang mereka bentuk atau mainkan..

## 5. Subjektivitas Media dan Omnibus Law Dalam Perspektif Keadilan Gender

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gender adalah hal yang krusial untuk dibahas, apalagi dalam media karena bisa dilihat dari fungsinya sendiri yaitu media sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, dengan jumlah yang banyak dan tempat tinggal yang jauh, itu artinya media memiliki akses dan kuasa yang besar dalam menyajikan setiap informasi yang akan

disajikan kepada khalayak. Termasuk dalam ini adalah pemberitaan mengenai gender. Perempuan selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Saat ini banyak berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Media disini mempunyai peran yang besar untuk membangun persepsi masyarakat akan keadilan gender dengan cara memframing berita menjadi lebih ramah gender karena dalam setiap pemberitaan, sebuah media memiliki frame tertentu. Untuk mengetahui bagaimana framing berita dari sebuah realitas atau peristiwa. Analisis bingkai atau metode analisis framing adalah cara untuk mengamati bagaimana realitas dibingkai dan dipublikasikan oleh media. Maka dari itulah media memiliki peran untuk menyingkirkan stigma patriarki yang ada dalam masyarakat dengan membangun eksternalisasi bahwa pernyataan laki-laki lebih kuat dan berhak ada diranah publik sedangkan wanita dinilai lemah dan hanya bisa dalam sektor domestik saja itu adalah hal yang salah.

Bias gender juga dibahas dalam berita mengenai Omnibus law RUU cipta kerja yang sedang gencar dibahas oleh setiap portal berita termasuk diantaranya adalah Kompas.com dan Tempo.co. Penulis menggunakan 4 berita dari masing-masing pada portal berita tersebut. tampak sekilas berita tersebut sama karena sama-sama membahas mengenai tuntutan para buruh yang menginginkan diberhentikannya pembahasan omnibus law karena dianggap merugikan serta mengancam kesejahteraan buruh terutama buruh perempuan karena pada Omnibuslaw RUU Cipta kerja tidak ada satupun pasal yang menyebut tentang perempuan, apalagi membahas tentang hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan pekerja.

Dalam pemberitaan Kompas.com isu gender dalam omnibus law ini dibahas dengan cukup detail, Kompas banyak mengutip pernyataan-pernyataan tentang persoalan yang dialami oleh para buruh perempuan karena adanya omnibus law cipta kerja ini. Dalam berita Kompas.com mengatakan bahwa didalam omnibus law cipta kerja tidak ada satupun pasal yang menyebut kata perempuan. Kompas.com juga dinilai lebih moderat, gaya bahasa pemberitaan dalam Kompas juga terkesan lunak atau halus. Selanjutnya dalam pemberitaan yang ada pada Tempo.co terlihat lebih ekspresif dengan pilihan kata yang dipilih dengan menjelaskan bahwa omnibus law sangat tidak ramah terhadap perempuan bahkan merugikan dan mengancam kesejahteraan hidup buruh karena Omnibus law dianggap telah melemahkan sistem pengupahan pada buruh terutama buruh perempuan, dengan tidak mengaji karyawan yang cuti haid, melahirkan, menyusui dan juga keguguran. Hal ini sebagai bukti diskriminasi pada gender masih benar adanya, maka dari itu pemerintah harusnya dapat lebih memerhatikan lagi hak-hak setiap warga negaranya, terutama pekerja perempuan. Perempuan berhak memperoleh haknya secara penuh tanpa diskriminasi atas dasar apapun hal tersebut dilakukan untuk mencapai keadilan gender yang sesungguhnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan terkait model analisis framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis teks berita online dalam mengemas pemberitaan gender dalam omnibus law, penulis menarik kesimpulan bahwa;

**Sintaksis**, Kompas.com menjelaskan tentang isi kerugian yang terjadi pada buruh perempuan, dalam hal ini kompas.com lebih menunjukkan sisi gendernya, Berita yang ada pada kompas.com dalam setiap beritanya banyak mengutip pernyataan dari pihak yang terlibat yakni pendemo atau tokoh perempuan yang ada didalamnya. Sedangkan pada Tempo.co lebih menyoroti fleksibilitas RUU Cipta kerja dalam bidang ekonominya, dan lebih sedikit mengutip pernyataan dari satu pihak yang terlibat saja, mengutip bagian yang tidak menjelaskan permasalahan dan lebih banyak menampilkan opini dari wartawan saja.

**Skrip**, Kompas.com dalam 4 berita yang ada disajikan diatas kompas.com mencatumkan struktur ini dengan menggunakan 5W + 1H dalam analisis framingnya dan sudah tertera secara lengkap tentang apa saja tuntutan yang dinilai merugikan buruh perempuan. Sedangkan Tempo.co juga serupa mencantumkan struktur skrip dengan unsur 5W+ 1H yang sudah tertera secara lengkap juga dengan membahas tentang tuntutan para buruh yang menilai bahwa omnibuslaw berpotensi mengancam kesejahteraan buruh perempuan dan juga kritik terhadap pemerintah akan hal itu.

**Tematik**, Kompas.com menuliskan realitas pada beritanya dengan cukup detail, kompas memberi ruang kepada pihak lain untuk menanggapi tuntutan yang ada pada

beritanya dalam hal ini kompas.com menyajikan tanggapannya dari dua sisi yaitu buruh dan juga pemerintah dalam beritanya. Sedangkan Tempo.co tidak memberikan kesempatan kepada yang tergugat dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengutarakan tanggapannya dalam masalah ini. Sehingga pada berita yang ada pada tempo hanya ada satu pihak yang bersuara yakni penuntut atau para buruh.

**Retoris,** Kompas.com pemilihan kata yang dipakai dalam kompas.com terkesan lebih halus, lunak dan moderat antara lain; Nasionalis, Kerugian buruh, Mengeliminasi hak perempuan, Diskriminasi, Perlindungan perempuan, upah. Dalam berita Kompas.com ini wartawan menampilkan gambar yang mendukung dengan isi berita, tapi sayangnya pada salah satu beritanya yakni pada berita 3 tampilan gambar yang digunakan kurang tepat karena waktu pengambilan foto tidak sesuai dengan tanggal berita tersebut diterbitkan dan dalam foto tersebut juga tidak sesuai dengan judul yang ada yakni bukan FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) melainkan GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat). Sedangkan pada Tempo.co pemilihan kata yang dipakai mengartikan Omnibus law RUU cipta kerja dalam tempo sendiri terkesan lebih negatif serta ekspresif jika dilihat dari pilihan kata yang dipilih antara lain; Aturan sapu jagad, RUU Cilaka, Ancaman, Tidak ramah perempuan, Patriarki, Keberpihakan Omnibus law pada pemilik modal. Dalam semua berita yang diterbitkan oleh Tempo.co disini wartawan tidak sama sekali menggunakan gambar yang dapat mendukung serta sesuai isi berita.

## B. Saran

### 1. Saran Akademik

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap pada penelitian berikutnya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana media dalam membingkai atau memframing suatu peristiwa sehingga sampai menjadi sebuah rangkuman berita yang kemudian siap untuk dibagikan kepada khalayak. Hasil dari penilaian framing media di atas mengenai Pemberitaan Gender Dalam Omnibus Law Cipta Kerja pada Kompas.com dan Tempo.co pada rentang waktu 8 Januari - 24 April 2020 tersebut dapat dikembangkan lagi mengikuti informasi tentang perkembangan Omnibus Law selanjutnya, dan juga peneliti berikutnya juga bisa melihat lebih rinci atas bias gender yang ada dalam omnibus law cipta kerja selanjutnya.

### 2. Saran Praktis

Penelitian dengan menggunakan metode framing seperti yang dilakukan penulis ini tidak hanya dapat meneliti berita mengenai pemberitaan politik saja tetapi bisa juga berita dengan peristiwa lain seperti konflik antar suku, ekonomi atau hal yang lain seperti bencana alam dan juga lain sebagainya.

Dari penelitian ini, disarankan juga agar praktisi media dapat tetap mengutamakan objektivitas dalam pemberitaan yang mereka angkat dan juga menjunjung nilai - nilai kode etik jurnalistik dan juga komunikasi massa. Demi menghindari pergeseran makna dalam memaknai suatu berita, penulis juga menyarankan supaya masyarakat dapat lebih aktif dan kritis dalam menilai sebuah berita.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agus, Sudibyo. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS.
- Ahmad Redi. 2020. *Omnibus Law : Metode Sakti Mengatasi Kebuntutan Praktik Berhukum*. Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan.
- Cangara. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Group
- Eriyanto. 2006. *Analisis wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fakih Mansoer. 2008. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Hamdanah. 2005. *Musim Kawin di Musim Kemarau: Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*. Jogjakarta: BIGRAF Publishing.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta, Penerbit Erlangga
- Jaya Suprana. 2004. *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta: PT Gramedia
- John Stephen W little. 2016. *Ensiklopedia Teori Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Karman. 2015. *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realita Peter L. Berger)*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol 5 No.3 . Jakarta

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2004. *Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA.*
- Mulia SitiMusdah. 2005. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis. Bandung: Mizan*
- Mansour Fakih. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.*
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya*
- Narasudin Umar. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an. Jakarta: Paramadina.*
- Sobur Alex. 2002. *Analisis teks: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Sudibyo Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta; LkiS.*
- Steele, Janet. Wars Within. 2007. *Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru. Jakarta: Dian Rakyat.*
- Sobur Alex. 2012. *Analisis Teks Media. Bandung: Rosdakarya.*
- S.T.Akbar.Ali.2005. *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web. Bandung: M2S.*
- Sjaiful, M. 2021. *Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Media Iuris, 4(1)*
- W.J.S. Purwadaminta. 2006. *Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka*
- Yulianti Yayuk. 2011. *Perubahan ekologis dan strategi adaptasi masyarakat di wilayah pegunungan tengger (suatu kajian gender dan lingkungan. Univ Brawijaya press*

**Kompas.com :**

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh>.

<https://inside.kompas.com/about-us>,

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/apa-itu-omnibus-law>

<https://kb.kompas.id/baca/produk/apa-bedanya-dengan-kompas-com/>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/12371281/kompascom-dan-14-september-1995>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/17422231/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-berpotensi-merugikan-buruh-perempuan?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/19/20473131/aktivis-sebut-omnibus-law-tidak-berpihak-pada-perempuan-ini-sebabnya>

<https://search.kompas.com/search/?q=FR1%3B+Perlindungan+Pekerja+Perempuan+Terdampak+RUU+Cipta+Kerja&submit=Submit>

<https://pemilu.kompas.com/read/2020/03/06/172013026/tolak-omnibus-law-buruh-perempuan-gelar-aksi-demo>

**Tempo.co :**

<https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah>

<https://www.tempo.co/about>

<https://nasional.tempo.co/read/1297026/ruu-omnibus-law-dinilai-ancam-pekerja-perempuan>

<https://nasional.tempo.co/read/1335199/alasan-komnas-perempuan-minta-ruu-cipta-kerja-dibatalkan>

<https://metro.tempo.co/read/1333968/hari-kartini-buruh-perempuan-minta-omnibus-law-dihentikan>

<https://nasional.tempo.co/read/1316934/massa-serukan-tolak-omnibus-law-di-aksi-hari-perempuan-sedunia>

**Repository :**

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33632/1/FAHMI%20-FDK.pdf>

[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9457/2/TAHRIFUDIN\\_ANALISIS%20FRAMING%20PEMBERITAAN%20MEDIA%20ONLINE%20MENGENAI%20BERITA%20RANCANGAN%20UNDANG-UNDANG%20HALUAN%20IDIOLOGI%20PANCASILA%20DI%20MEDIA%20KOMPASS.COM%20DAN%20REPUBLIKA%20ONLINE.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9457/2/TAHRIFUDIN_ANALISIS%20FRAMING%20PEMBERITAAN%20MEDIA%20ONLINE%20MENGENAI%20BERITA%20RANCANGAN%20UNDANG-UNDANG%20HALUAN%20IDIOLOGI%20PANCASILA%20DI%20MEDIA%20KOMPASS.COM%20DAN%20REPUBLIKA%20ONLINE.pdf)

<http://repository.uin-suska.ac.id/21183/9/SKRIPSI%20LENGKAP%20SUHAIMAH.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/13234/1/SKRIPSI%20AMY%20TERBARU.pdf>

**Lainnya :**

[www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org),

<https://digilib.uin->

[suka.ac.id/id/eprint/3724/1/BAB%20I%20C%20IV%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3724/1/BAB%20I%20C%20IV%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

<https://dokumen.tips/documents/analisis-framing-media-massa-konstruksi-berita-politik-jika-dikemudian.html?page=1>

<https://www.semanticscholar.org/paper/KONSTRUKSI-REALITAS-MEDIA-MASSA-TEMPO-DAN-REPUBLIKA-Safwedha-Suprihatini/321d0c0559d06e0054cb753df26be0dc5f755d38>

<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10193/FIX%20SKRIPSI%20SIDANG.pdf?sequence=1&isAllowed=y>